



LAPORAN KINERJA (LKj)

Tahun 2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan



Balai KIPM Mataram

 Jl. Adi Sucipto Kel. Pejarakan Karya,
Kec. Ampenan, Kota Mataram
Nusa Tenggara Barat

 0370-6194701

 bkipmmataram@kkp.go.id

 BPPMHKP Mataram

 BKIPM Mataram

 [bppmhkp.mataram](https://www.instagram.com/bppmhkp.mataram)





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT., Balai KIPM Mataram dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 dengan tepat waktu.

LKj Tahun 2024 Balai KIPM Mataram disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja terkait pelaksanaan program dan kegiatan Balai KIPM Mataram selama tahun 2024.

LKj ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran kegiatan dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai KIPM Mataram yang merupakan penjabaran dari target kinerja tahun 2024.

Untuk mewujudkan unit kerja yang akuntabel, indikator kinerja disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Seperti halnya triwulan IV tahun 2024 terkait SOTK baru tentang perubahan tugas dan fungsi BPPMHKP, maka terjadi perubahan indikator kinerja baik dalam hal uraian ataupun targetnya. Sehingga mengakibatkan perubahan dokumen kinerja terutama Perjanjian Kinerja yang mengalami revisi pada bulan Oktober 2024.

Semoga LKj Tahun 2024 Balai KIPM Mataram ini dapat menjadi sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja Balai KIPM Mataram, serta dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi bagi seluruh jajaran Balai KIPM Mataram agar memacu kinerja ke depan agar lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Mataram, 15 Januari 2025
plt. Kepala Balai KIPM Mataram,

M. Farchan



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Visi dan Misi Organisasi	3
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
BAB II. Perencanaan Kinerja	6
2.1 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja	6
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	9
3.1 Capaian Kinerja	9
3.2 Analisis dan Evaluasi	12
3.3 Realisasi Anggaran	48
BAB IV. Penutup	51
Lampiran-lampiran	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai KIPM Mataram Tahun 2024	7
Tabel 3.1	Klasifikasi Warna Capaian Berdasarkan Status Kinerja	9
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Balai KIPM Mataram Triwulan III Tahun 2024	10
Tabel 3.3	Target dan Realisasi IK01	15
Tabel 3.4	Target dan Realisasi IK02	18
Tabel 3.5	Target dan Realisasi IK03	21
Tabel 3.6	Target dan Realisasi IK04	22
Tabel 3.7	Target dan Realisasi IK05	25
Tabel 3.8	Target dan Realisasi IK06	27
Tabel 3.9	Kategorisasi Kepuasan Pelayanan	29
Tabel 3.10	NRR dan IKM Per Unsur Balai KIPM Mataram	30
Tabel 3.11	Target dan Realisasi IK07	30
Tabel 3.12	Target dan Realisasi IK08	35
Tabel 3.13	Target dan Realisasi IK09	36
Tabel 3.14	Target dan Realisasi IK10	39
Tabel 3.15	Target dan Realisasi IK11	43
Tabel 3.16	Target dan Realisasi IK12	44
Tabel 3.17	Target dan Realisasi IK13	46
Tabel 3.18	Target dan Realisasi IK14	47
Tabel 3.19	Target dan Realisasi IK15	48
Tabel 3.20	Penyerapan Anggaran per Nama Kegiatan Triwulan IV T.A. 2024	50
Tabel 3.21	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan IV T.A. 2024	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Balai KIPM Mataram	5
Gambar 2	Dashboard Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	10
Gambar 3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Balai KIPM Mataram Triwulan IV Tahun 2024	29
Gambar 4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2024 Balai KIPM Mataram	39
Gambar 5	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2024 Balai KIPM Mataram	43
Gambar	Persentase TLHP Balai KIPM Mataram pada Triwulan IV Tahun 2024	45

IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai capaian kinerja IKU dan IKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tahun 2024 adalah sebesar 114,41 dengan kategori “Istimewa”. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Kegiatan dan target Indikator Kinerja Balai KIPM Mataram yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- A. Dari 15 indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024, seluruh indikator telah tercapai sesuai target dan/atau melebihi target dengan perhitungan data nilai posisi akhir.
- B. Uraian capaian indikator kinerja dengan target triwulanan:
 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%). Ditargetkan pada triwulan IV 70% dan tercapai 100% atau dalam persentase kinerja 120%;
 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%). Terealisasi 332,5% dari target 70% pada triwulan IV atau setara dengan 120% persentase kinerja;
 3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%). Tercapai 100% dari target 70% atau dalam persentase kinerja 120%;
 4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%). Tercapai 100% dari target 99% atau setara dengan 101,01% persentase kinerja;
 5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Mataram (Indeks). Ditargetkan 3,36 dan tercapai 3,91 atau dengan persentase 116,37%;
 6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Mataram, terealisasi 100% dari target 80%, atau tercapai 120% dalam persentase kinerja.



C. Uraian capaian indikator kinerja dengan target semester dan tahunan:

1. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Mataram (%), dengan target 70% dan tercapai 83,10% atau dengan persentase 118,71%;
2. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Inovasi). Tercapai 100% dari target 1 inovasi;
3. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Mataram, dengan target semester I nilai 81 dan target semester II nilai 86. Pada semester I tercapai nilai 89,34 atau 110,30% dan pada semester II tercapai 93,73 atau dengan persentase 108,99%;
4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Mataram, merupakan indikator kinerja dengan target tahunan 82 (nilai) tercapai 83,60 atau dengan persentase 101,95%;
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai KIPM Mataram, merupakan indikator kinerja dengan target tahunan 71 (nilai) dan tercapai 96,06 atau dengan persentase kinerja 120%;
6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Mataram, target semester I nilai 83 dan semester II target 93,76. Pada semester I tercapai nilai 89,54 atau 107,88% dan pada semester II tercapai 94,92 atau dengan persentase 101,24%;
7. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Mataram, merupakan indikator kinerja dengan target tahunan 100% dan tercapai 100%;
8. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT Balai KIPM Mataram, merupakan indikator kinerja dengan target tahunan 80% dan tercapai 84,34% atau dengan persentase 105,43%;
9. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup UPT Balai KIPM Mataram, merupakan indikator kinerja dengan target tahunan 80% dan tercapai 97,50% atau dengan persentase kinerja 120%..



Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Mataram sampai triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp 5.927.477.668 atau mencapai 98,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp 5.992.904.000.

Dari Laporan Realisasi Penerimaan PNBP, jumlah total penerimaan PNBP sampai triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp 88.475.000 dari target Rp 120.000.000 atau tercapai 73,73%. Realisasi PNBP tahun 2024 tidak dapat memenuhi target karena terkait adanya reorganisasi BKIPM menjadi BPPMHKP sehingga terjadi pengurangan PNBP dikarenakan penarikan PNBP untuk BKHIT yang merupakan PNBP jasa Karantina. Pencapaian PNBP tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) maupun tahunan (LKj

Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian Target Kinerja.

Pelaporan Kinerja dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Pelaporan dilakukan menggunakan metode *bottom-up*. Data diperoleh dari Unit terbawah lalu dikumpulkan di Unit di atasnya. Data capaian (dan Target) disampaikan secara lengkap disertai dokumen data dukung yang dibuat secara terpisah dari laporannya.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Balai KIPM Mataram berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja memuat informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).

Laporan Kinerja (LKj) atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai KIPM Mataram disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Mataram dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama dan/atau sampai dengan triwulan IV tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Balai KIPM Mataram.

1.2. VISI DAN MISI ORGANISASI

Visi Balai KIPM Mataram mengacu pada visi BPPMHKP, yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian,

berlandaskan gotong royong.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai KIPM Mataram mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu:

- Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
- Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi, tujuan, serta sasaran strategis, Balai KIPM Mataram perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Balai KIPM Mataram secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

1. Kedudukan, tugas dan fungsi Balai KIPM Mataram:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 5 tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Balai KIPM Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (UPT BPPMHKP) mengemban tugas menyelenggarakan Pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Mataram menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawau mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

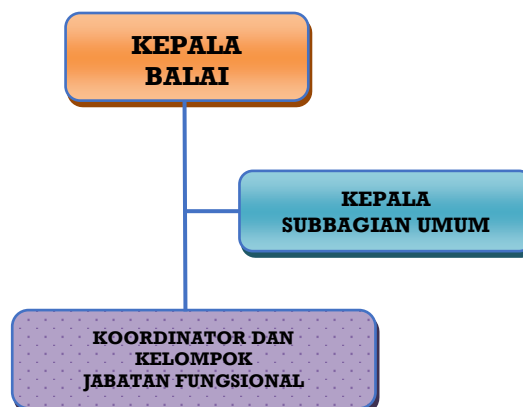
2. Struktur organisasi Balai KIPM Mataram

Balai KIPM Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP di bidang pelayanan operasional, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai KIPM Mataram mempunyai jumlah SDM aparatur yang mendukung saat ini berjumlah 19 orang ASN, yang terdiri dari 16 orang PNS dan 3 orang tenaga PPPK dengan komposisi pegawai 10 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

Gambar 1

Struktur Organisasi Balai KIPM Mataram *



*Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Pada triwulan IV tahun 2024 yaitu bulan Oktober, terkait SOTK baru BPPMHKP sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsi BPPMHKP, maka terjadi perubahan beberapa indikator kinerja kegiatan yang mengakibatkan perubahan dokumen kinerja.

Pada Perjanjian Kinerja (PK) sebelumnya jumlah indikator kinerja kegiatan berjumlah 17 IKU. Setelah mengalami revisi jumlah indikator menjadi 15 IKU.

Pada Sasaran Kegiatan 1, semua IKU mengalami perubahan yang semula 5 IKU menjadi 4 IKU dengan perubahan nama IKU juga.

Pada Sasaran Kegiatan 2, semula terdapat 3 IKU yaitu nilai survei kepuasan masyarakat, Quality Assurance dan Destructive Fishing. Namun, setelah dilakukan revisi hanya ada 1 IKU yaitu terkait pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi.

Pada Sasaran Kegiatan 3, semula 9 IKU, setelah mengalami revisi menjadi 10 IKU dengan rincian 7 IKU tetap, 1 IKU dihilangkan karena bukan target (Pembangunan Unit Kerja Berpredikat WBK), 1 IKU mengalami perubahan nama yaitu "Nilai Kinerja Anggaran" menjadi "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran", penambahan 1 IKU yang semula terdapat pada

Sasaran Kegiatan 2 yaitu Survei Kepuasan Masyarakat menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat di Sasaran Kegiatan 3, dan penambahan 1 IKU baru yaitu Inovasi Pelayanan Publik. Berikut indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Balai KIPM Mataram (Revisi).

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Target Indikator Kinerja Balai KIPM Mataram Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Mataram (%)	70
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Inovasi)	1
		7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Mataram (Indeks)	3,36
		8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai indeks)	86
		9	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	82

		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	71
		11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	93,76
		12	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	100
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	80
		14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	80
		15	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan pengukuran kinerja Balai KIPM Mataram, sebagaimana unit kerja lain di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja secara online yaitu melalui website www.kinerjaku.kkp.go.id. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pedoman Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Adapun output yang dihasilkan aplikasi paling sedikit meliputi:

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) / Skor Kinerja Organisasi; dan
2. Nilai Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial (IKU dan IKM) Organisasi.

Pada triwulan IV tahun 2024 pencapaian kinerja untuk setiap Sasaran dan Indikator Kinerja pada aplikasi kinerjaku diklasifikasikan dengan warna berdasarkan status kinerja sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Klasifikasi Warna Capaian Berdasarkan Status Kinerja

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Capaian kinerja Balai KIPM Mataram sampai dengan triwulan IV tahun 2024 masuk dalam klasifikasi capaian “Istimewa”, hal ini ditandai dengan Skor Kinerja atau Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,41 dan ditandai dengan warna biru seperti ditampilkan gambar *Dashboard* Aplikasi Kinerjaku Balai KIPM Mataram berikut ini.

Gambar 2
Dashboard Capaian Kinerja IKU Tahun 2024



Secara rinci capaian Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Balai KIPM Mataram yang ditargetkan pada triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Balai KIPM Mataram Triwulan IV Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2024	TARGET TW IV	REALISA SI TW IV	% thd TARGET
						%	2024
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu							
SK1.1	Terselenggarakan ya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70%	70%	100% 120%	120%
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70%	70%	332,5% 120%	120%
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70%	70%	100% 120%	120%
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	99%	99%	100% 101,01%	101,01%
Kegiatan 2. Kegiatan Manajemen Mutu							

SK2. 1	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Mataram (%)	70%	70%	83,10% 118,71%	118,71%
-----------	---	---	--	-----	-----	-------------------	---------

KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal

SK3. 1	Tata kelola pemerintahan yang baik	6	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Inovasi)	1	1	100% 100%	100%
		7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Mataram (Indeks)	3,36	3,36	3,91 116,37%	116,37%
		8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai indeks)	86	86	93,73 108,99%	108,99%
		9	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	82	82	83,60 101,95%	101,95%
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	71	71	96,06 120%	120%
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	93,76	93,76	94,92 101,24%	101,24%
		12	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	100%	100%	100% 100%	100%
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	80%	100%	120% 120%	120%
		14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	80%	80%	84,34% 105,43%	105,43%
		15	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	80%	80%	97,50% 120%	120%

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut (dengan perhitungan nilai posisi akhir).

Sasaran Kegiatan 1. Pengendalian Mutu

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Kegiatan 1 secara rinci sebagai berikut:

IK01. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Formula untuk menghitung capaian IK:

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yang ada di UPT*

Sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yang ditargetkan di Balai KIPM Mataram pada triwulan IV tahun 2024 yaitu CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik) dan CPIB Kapal (Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal).

Realisasi sertifikat CPIB sebanyak 1 sertifikat dari target 1 sertifikat atau tercapai 100%, dan realisasi sertifikat CPIB Kapal tercapai 100% dari target 4 sertifikat.

Berikut capaian dan perhitungan IK “Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram”:

- **CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik):**

Target Sertifikat CBIB = 0

Capaian Sertifikat CBIB = 0

Persentase Capaian (A) = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

- **CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)**

Target Sertifikat CPIB = 1 sertifikat

Capaian Sertifikat CPIB = 1 sertifikat

$$\text{Persentase Capaian (B)} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

- **CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik)**

Target Sertifikat CPPIB = 0

Capaian Sertifikat CPPIB = 0

$$\text{Persentase Capaian (C)} = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

- **CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik)**

Target Sertifikat CPOIB = 0

Capaian Sertifikat CPOIB = 0

$$\text{Persentase Capaian (D)} = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

- **CDOIB (Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik)**

Target Sertifikat CDOIB = 0

Capaian Sertifikat CDOIB = 0

$$\text{Persentase Capaian (E)} = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

- **CPIB Kapal (Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal)**

Target Sertifikat CPIB Kapal = 4 sertifikat

Capaian Sertifikat CPIB Kapal = 4 sertifikat

$$\text{Persentase Capaian (F)} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Indikator IK01:

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\% \\ &= \frac{100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%}{6} \times 100\% \\ &= 100\% \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Indikator ini merupakan indikator baru pada triwulan IV tahun 2024 dan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 144.479.000 serta terealisasi Rp. 144.203.604 atau 99,81%.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi IK01

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi TW Sblmnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian thd Target TW IV	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK 2024	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	-	-	70%	100%	120	70%	70%	120	-	70%	120

Ket. : Tahun 2019 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

IK02. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);

3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Formula untuk menghitung capaian IK:

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)*

****) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi pasca panen yang ada di UPT***

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan untuk konsumsi manusia. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan (*in process inspection*) dapat dilakukan sehingga tindakan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan.

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 dan Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Sertifikat HACCP yang diterbitkan berdasarkan jenis produk dan jenis proses serta potensi bahaya (*hazard*).

Permohonan sertifikat penerapan HACCP:

- UPI mengajukan permohonan
- Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat SM
- Inspeksi oleh inspektur mutu
- UPI melakukan tindakan perbaikan
- Evaluasi dan verifikasi tindakan perbaikan
- Penerbitan sertifikat HACCP

Perpanjangan sertifikat penerapan HACCP:

- Verifikasi dan survailen konsistensi penerapan HACCP di UPI
- Penerbitan sertifikat HACCP

Sertifikat Kelayakan Pengolahan disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.

Pelaku Usaha industri Pengolahan Ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi diberikan SKP bagi setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah.

Persyaratan permohonan untuk memiliki SKP:

- a. NIB;
- b. kopi SPI atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu;
- c. panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi; dan
- d. rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Realisasi *Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Mataram pada triwulan IV tahun 2024 tercapai 53 sertifikat dari target 20 sertifikat atau mencapai 265%.

Sedangkan realisasi SKP pada triwulan IV tahun 2024 tercapai 52 sertifikat dari target 13 sertifikat atau mencapai 400%.

Berikut penghitungan capaian indikator ini:

HACCP

Target Sertifikat HACCP = 20 sertifikat

Capaian Sertifikat HACCP = 53 sertifikat

$$\text{Persentase Capaian (A)} = \frac{53}{20} \times 100\% = 265\%$$

SKP

Target Sertifikat SKP = 13 sertifikat

Capaian Sertifikat SKP = 52 sertifikat

$$\text{Persentase Capaian (B)} = \frac{52}{13} \times 100\% = 400\%$$

Capaian Indikator IK02:

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{A+B}{xn} \times 100\% \\ &= \frac{265\%+400\%}{2} \times 100\% \\ &= 332,5\% \times 100\% \\ &= 332,5\% \end{aligned}$$

Jadi, capaian indikator “Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan” triwulan IV tahun 2024 sebesar 332,5% dari target 70% atau dengan capaian persentase kinerja sebesar 120%.

Indikator ini merupakan indikator baru dari hasil revisi indikator kinerja di triwulan IV tahun 2024 dengan pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 30.800.000 dengan realisasi sebesar Rp. 30.674.700 atau sama dengan 99,59% dari pagu anggaran.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi IK02

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi TW Sblmnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian thd Target TW IV	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK 2024	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	-	-	70%	332,5%	120	332,5%	70%	120	-	70%	120

Ket. : Tahun 2019 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

IK03. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Balai KIPM Mataram

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan

Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.

Balai KIPM Mataram melakukan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada pasar – pasar tradisional dan modern di 5 (lima) lokasi yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa.

Pengawasan mutu Periode I telah dilakukan pada triwulan I tahun 2024 dengan lokus: **Kota Mataram** (Pasar Ampenan, Hypermart dan Lotte Mart), **Kabupaten Lombok Barat** (Pasar Pelangan, Pasar Lembar dan Pasar Gerung), **Kabupaten Lombok Tengah** (Pasar Jelojok dan Pasar Renteng), **Kabupaten Lombok Timur** (TPI Tanjung Luar dan Lobster Estate) dan **Kabupaten Sumbawa** (Pasar Seketeng). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memantau pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partifipatif di pasar sebagai salah satu sentra penyedia pangan sehat.

Pengawasan mutu Periode II telah dilakukan pada triwulan III tahun 2024 dengan lokus yang sama seperti periode sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki program untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar maupun sentra produksi ikan sehat, serta penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat.

Nama indikator ini sebelumnya “Pengawasan mutu hasil perikanan domestik” dengan target 5 lokasi dan pada triwulan III tahun 2024 mencapai 100% dari target 5 lokasi. Capaian ini sama dengan realisasi pada triwulan III tahun 2023.

Namun, dengan adanya revisi indikator pada dokumen kinerja indikator tersebut diganti menjadi “Persentase pengawasan mutu hasil perikanan” dengan target 70% pada triwulan IV tahun 2024.

Realisasi Persentase pengawasan mutu hasil perikanan pada triwulan IV tahun 2024 sebesar 100% atau mencapai 120% dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

%X = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI

A = Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP = 5 kabupaten/kota

B = Jumlah kabupaten/kota yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP = 5 kabupaten/kota

Capaian Indikator IK03:

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$= \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Indikator ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 98.008.823 atau setara dengan 98,01%.

Perbandingan capaian indikator sampai pada triwulan IV tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi IK03

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi TW Sblmnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian thd Target TW III	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK 2024	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	-	-	70%	100%	120	100%	70%	120	-	70%	120

Ket. : Tahun 2019 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

IK04. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 HC Mutu yang terbit sebanyak 90 sertifikat (Lampiran IK.04) dan seluruhnya tidak ada penolakan dari negara tujuan ekspor.

Formula untuk menghitung capaian indikator:

$$\%X = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

%X = Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP Mataram = 90 HC Mutu

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan = 0 (tidak ada yang ditolak)

Capaian indikator IK04:

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{A-B}{A} \times 100\% \\ &= \frac{90-0}{90} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Indikator ini baru di triwulan IV tahun 2024 yang merupakan hasil revisi dokumen kinerja pada triwulan IV tahun 2024.

Dari perhitungan capaian indikator ini tercapai 100% dari target 99% atau setara dengan 101,01%.

Pagu anggaran untuk indikator ini sebesar Rp. 34.206.000,- dengan realisasi Rp. 34.205.200 atau setara dengan 99,99% dari pagu anggaran.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Target dan Realisasi IK04

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi TW Sblmnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian thd Target TW IV	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK 2024	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	100	-	-	100	-	99%	100%	101,01	100%	99%	101,01	98%	99%	101,01

Ket. : Tahun 2019, 2021, 2022 tidak terdapat IKU tersebut

Sasaran Kegiatan 2. Manajemen Mutu

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Kegiatan 2 secara rinci sebagai berikut:

IK05. Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup Balai KIPM Mataram

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum

2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Penghitungan capaian indikator terkait nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi:

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

%X = Persentase Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi

A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 = 81,35%

B = Persentase Nilai Penerapan ISO 17025 = 84,85%

Capaian Indikator IK05:

A = 81,35%

B = 84,85%

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{A+B}{2} \times 100\% \\ &= \frac{81,35\%+84,85\%}{2} \times 100\% \\ &= 83,10\% \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian indikator kinerja utama nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup UPT BPPMHKP dihasilkan sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar 81,35 didapatkan dari 13 laboratorium pengujian;
2. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sebesar 84,85 didapatkan dari 14 lembaga inspeksi;
3. Maka capaian indikator kinerja utama Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP sebesar 83,10.

Indikator ini baru di tahun 2024 dan realisasi triwulan IV tahun 2024 sebesar 83,10% dari target 70% atau tercapai 118,71%.

Pagu anggaran untuk indikator ini sebesar Rp. 79.500.000,- dengan realisasi Rp. 78.883.752 atau setara dengan 99,22% dari pagu anggaran.

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Target dan Realisasi IK05

Realisasi					Tahun 2024								Renstra 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi TW Sblmnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian thd Target TW IV	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK 2024		Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	-	-	70%	83,10%	118,71	83,10%	70%	118,71		-	70%	118,71

Ket. : Tahun 2019 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

Sasaran Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Kegiatan 3 secara rinci sebagai berikut:

IK06. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

- Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan
- Kelompok inovasi: umum, khusus

- Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%)
- Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adaptabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%)
- Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan.
- IKU inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Lingkup UPT BPPMHKP, dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. Eselon 2 yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I.
 - b. Target hasil: Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Eselon I

Inovasi dihitung dari:

Jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi di Tingkat BPPMHKP dan ditetapkan melalui Berita Acara yang ditetapkan oleh Tim Penilai.

Realisasi indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target 1 inovasi.

Pagu anggaran untuk mendukung indikator Inovasi Pelayanan Publik sebesar Rp. 45.000.000 dan terealisasi 100%.

Perbandingan capaian indikator ini pada triwulan IV tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Target dan Realisasi IK06

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi TW Sblmnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian thd Target TW IV	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK 2024	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	1	-	-	-	-	1	1	100	-	1	100	1	1	100

Ket. : Tahun 2019, 2021 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

IK07. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Mataram

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Selain itu, data SKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Daftar pertanyaan survei terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuesioner.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Kep/14/M.PAN/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, Balai KIPM Mataram telah melakukan Pengukuran Survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan pengendalian mutu hasil perikanan ekspor pada triwulan IV tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada triwulan IV tahun 2024 dilakukan pada awal bulan Oktober s/d akhir bulan Desember 2024 yang diisi oleh responden yang telah menerima pelayanan dari Balai KIPM Mataram minimal 3 bulan terakhir dengan mengisi kuesioner secara online pada *link*: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/>, kemudian dari data aplikasi SUSAN (Survei Kepuasan) tersebut diolah untuk menjadi sebuah bentuk Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.

Link dibagikan kepada pengguna jasa baik dengan mengirimkan link melalui WhatsApp dalam bentuk *QRcode* atau link website <https://ptsp.kkp.go.id/skm/> ataupun dengan menunjukkan *Qrcode* yang tersedia di meja pelayanan jika pengguna jasa langsung datang ke kantor pelayanan Balai KIPM Mataram.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang telah diisi secara online melalui aplikasi Susan (Survei Kepuasan) oleh responden pada triwulan IV tahun 2024 didapatkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) responden yang telah mengisi data dengan baik dan data ini kemudian diolah serta dianalisis lebih lanjut.

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

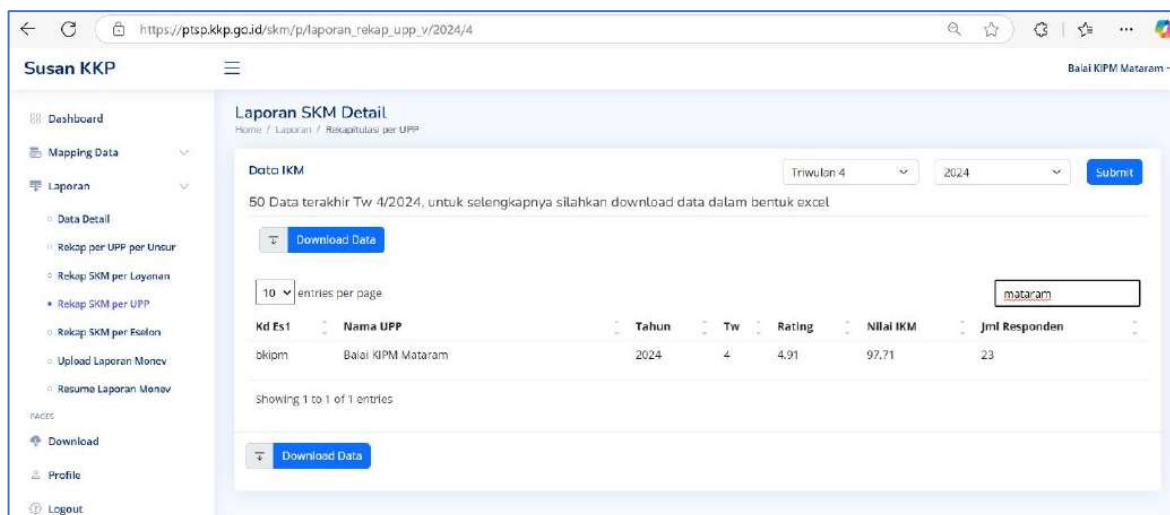
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: **IKM unit pelayanan x 25**

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Mataram pada triwulan IV tahun 2024 adalah 97,71 seperti terlihat pada Gambar 3

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Balai KIPM Mataram dipersepsikan Sangat Baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari nilai persepsi sebesar 97,71 berada dalam interval indeks persepsi antara 3,1 – 4,0

dengan nilai konversi interval indeks persepsinya berada antara 88,31 – 100,00 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.9 berikut.

Gambar 3
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Balai KIPM Mataram Triwulan IV Tahun 2024



Tabel 3.9 Kategorisasi Kepuasan Pelayanan

Nilai Persepsi	Interval Indeks Persepsi	Konversi Interval Indeks Persepsi	Kinerja Unit Pelayanan
1	3,1 - 4,0	88,31 – 100,00	(A) Sangat baik
2	2,1 - 3,0	76,61 – 88,30	(B) Baik
3	1,1 - 2,0	65,00 – 76,60	(C) Kurang baik
4	0,1 - 1,0	25,00 – 64,99	(D) Tidak baik

Pada triwulan IV tahun 2024, indikator “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di UPT Balai KIPM Mataram” dengan target “Nilai” mengalami perubahan nama indikator menjadi “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan UPT Balai KIPM Mataram” dengan target “Indeks”. Selain perubahan nama, indikator ini juga menjadi indikator kinerja kegiatan pada Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup UPT Balai KIPM Mataram” yaitu pada Tim Kerja Dukungan Manajerial.

Tabel 3.10 NRR dan IKM Per Unsur Balai KIPM Mataram

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Penilaian tentang kesesuaian persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan pada Balai KIPM Mataram.	3.91	90
2.	Penilaian mengenai kemudahan prosedur yang dijalani untuk mendapatkan layanan pada Balai KIPM Mataram.	3.91	90
3.	Penilaian mengenai kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan dengan yang diinformasikan pada Balai KIPM Mataram.	3.91	90
4.	Penilaian mengenai kesesuaian biaya pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan.	3.87	89
5.	Pemahaman tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan Balai KIPM Mataram.	3.96	91
6.	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan.	3.83	88
7.	Kemudahan dalam penggunaan fitur pada aplikasi sistem layanan.	3.87	89
8.	Penilaian tentang kualitas isi/konten dari aplikasi sistem layanan.	3.91	90
9.	Penilaian Bapak/Ibu mengenai layanan konsultasi dan pengaduan yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak lanjut) pada Balai KIPM Mataram.	4.00	92

Penghitungan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Jumlah Nilai Rata-rata (NRR) unsur}}{\text{Jumlah unsur}}$$

$$= \frac{(3,91+3,91+3,91+3,87+3,96+3,83+3,87+3,91+4)}{9} = \frac{35,17}{9} = 3,91$$

Realisasi indikator ini pada triwulan IV tahun 2024 adalah 3,91 dari target 3,36 atau tercapai 116,37% dan merupakan indikator baru pada tahun 2024.

Perbandingan capaian indikator ini pada triwulan IV tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Target dan Realisasi IK07

Realisasi					Tahun 2024								Renstra 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi TW Sblmnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian thd Target TW IV	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK 2024		Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	-	-	3,36	3,91	116,37	-	3,36	116,37		-	3,36	116,37

Ket. : Tahun 2019 s.d. 2023 tidak terdapat IKU tersebut

IK08. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Mataram

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Berikut ini adalah tabel pengkategorian nilai IP ASN sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019:

Kategori	Nilai
Sangat Tinggi	91 - 100
Tinggi	81 - 90
Sedang	71 - 80
Rendah	61 - 70
Sangat Rendah	0 - 60

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D III/SM	10
1	Pendidikan D II/D I/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

Sesuai dengan surat BKN 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tentang pengukuran IP ASN.

Pengukuran komponen kualifikasi dikategorikan sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh					Dibawah SLTA
	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/D-I/SLTA/Sederajat	
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	23	20	15	10	5
Jabatan Administrator	25	23	20	15	10	5
Jabatan Pegawai	25	23	21	20	15	10
Jabatan Pelaksana	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (keterampilan)	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (keahlian)	25	23	20	15	10	5

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Stuktural
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5

1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Perhitungan Komponen Diklat 20JP, Diklat Fungsional, dan Seminar

Nilai akan dihitung berdasarkan data-data yang bersumber pada fitur kursus di epegawai dan MyASN.

Komponen Diklat Fungsional diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional". Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional di tahun berapapun.

Komponen Diklat 20JP diambil dari data kursus dengan tipe kursus "Diklat Fungsional" atau "Diklat Teknis" yang dilaksanakan di tahun bersangkutan. Total kumulatif jumlah JP akan dihitung, apabila sama atau melebihi dari 20, maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20jp.

Komponen Seminar diambil dari data kursus dengan tipe kursus:

- Workshop,
- Pelatihan Manajerial,
- Pelatihan Sosio Kultural,
- Sosialiasi, dan
- Bimbingan Teknis.

Nilai komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir.

- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai	Nilai	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

Sesuai dengan surat BKN 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tentang pengukuran IP-ASN. Pengukuran komponen kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja dikategorikan sebagai berikut:

Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja IP ASN
Sangat Baik	30
Baik	25
Butuh Perbaikan	20
Kurang	15
Sangat Kurang	10

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:

- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
- Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sesuai dengan surat BKN 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tentang pengukuran IP ASN. Terdapat perubahan formula perhitungan dimana riwayat hukuman disiplin dihitung 1 (satu) tahun terakhir.

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di *update* pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perhitungan nilai Diklat PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Indikator Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Capaian IK ini dihitung semesteran. Target Semester I adalah 81 dan Semester II adalah 86.

Capaian IK Nilai IP ASN lingkup Balai KIPM Mataram semester I tahun 2024 adalah 89,34 atau tercapai 110,30% dan semester II tahun 2024 tercapai 93,73 atau dengan persentase 108,99% dari target (Gambar

Sedangkan pada semester I tahun 2023, capaian IP ASN Balai KIPM Mataram sebesar 82,44 dengan persentase 108,47% dan semester II tahun 2023 tercapai 90,44 dengan persentase 107,67%.

Pagu anggaran untuk mendukung indikator Indeks Profesionalitas ASN sebesar Rp. 5.289.836.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.251.583.993 atau setara dengan 99,28% dari pagu anggaran.

Perbandingan capaian indikator ini pada tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.12 Target dan Realisasi IK08

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi TW Sblmnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian thd Target TW IV	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK 2024	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
72,51	73	82,98	82,8	90,44	-	86	93,73	108,99	93,73	86	108,99	72	76	120

IK09. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Mataram

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB

Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Pada Tahun 2024, evaluasi dilaksanakan secara berjenjang, Unit Organisasi Level I lingkup KKP dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan Unit Organisasi Level II dievaluasi oleh Pengelola Kinerja Level I masing-masing.

Evaluasi atas AKIP dilaksanakan dengan penginputan mandiri komponen/subkomponen/kriteria beserta bukti evidence dan link evidence melalui Aplikasi Website Kinerjaku KKP dengan parameter dan bobot: Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%).

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM Mataram merupakan indikator baru di tahun 2024 dan ditargetkan tahunan nilai 82. Sedangkan pada tahun 2023 tidak terdapat indikator ini, namun dilakukan penilaian mandiri atas AKIP dengan nilai akuntabilitas 82,05 (A) sesuai yang tercantum pada LKE Satker di Aplikasi Kinerjaku KKP.

Realisasi indikator Penilaian Mandiri SAKIP Balai KIPM Mataram sebesar 83,6 atau tercapai 101,95% dari target.

Pagu anggaran untuk mendukung kegiatan indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP merupakan gabungan pagu anggaran dengan indikator Persentase Penyelesaian Temuan BPK dan indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan jumlah total Rp. 39.038.000 dengan realisasi sebesar Rp. 39.036.188 atau setara dengan 99,99% dari pagu anggaran.

Perbandingan capaian indikator ini pada tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Target dan Realisasi IK09

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi TW Sblmnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian thd Target TW IV	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK 2024	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	82	83,56	-	82,05	-	82	83,6	101,95	83,6	82	101,95	85	85	98,35

Ket.: Tahun 2019 dan 2022 tidak terdapat IKU tersebut/tidak dilakukan penilaian

IKI0. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Balai KIPM Mataram

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukan setiap Satuan Kerja Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke dalam Aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan besaran pagu pada DIPA masing-masing K/L, yaitu kategori Pagu Besar (pagu lebih besar atau sama dengan Rp 10 triliun); kategori Pagu Sedang (pagu Rp 2,5 triliun sampai dengan kurang dari Rp 10 triliun); dan kategori Pagu Kecil (pagu kurang dari Rp 2,5 triliun).

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ini juga menjadi salah satu unsur utama dalam penerapan kebijakan penghargaan dan/atau sanksi kepada K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu dilakukan evaluasi kinerja anggaran di seluruh K/L. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan melalui pengukuran dan penilaian atas kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun sebelumnya menggunakan Aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila $NKA > 90$;
2. Baik, apabila $NKA > 80 - 90$;
3. Cukup, apabila $NKA > 60 - 80$;
4. Kurang, apabila $NKA > 50 - 60$;
5. Sangat Kurang, apabila $NKA \leq 50$

Cara Perhitungan:

NKA Unit Eselon I

NKA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektivitas

1) Capaian Indikator Kinerja Program

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

- CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
 RIKSS_i : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
 TIKSS_i : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
 n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2) Nilai Efektivitas Satker

$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

- NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker
 RVRO_i : Realisasi Volume RO i
 TVRO_i : Target Volume RO i
 n : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

$$NE\ Satker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times W_{NEf_{satker}}) + (NE_{satker} \times W_{NE_{satker}})$$

Keterangan:

- NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
 CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
 NEf_{satker} : Nilai Efektivitas Satker
 NE_{satker} : Nilai Efisiensi Satker
 W_{CIKP} : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
 WNEf_{satker} : Bobot Nilai Efektivitas Satker

- WNE_{satker} : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Penilaian evaluasi kinerja anggaran dilakukan dengan periode tahunan dengan target 82 pada tahun 2023 yang merupakan target mandatori perubahan Perjanjian Kinerja dari sebelumnya 86. Realisasi indikator ini adalah 86,71 atau dengan persentase 105,74%.

Sedangkan pada tahun 2024 indikator ini ditargetkan dengan nilai 82.

Namun, sesuai dengan perubahan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja yang terjadi pada triwulan IV tahun 2024, indikator NKA diganti menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dengan target nilai 71.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dihitung dari Efektivitas Capaian RO dan Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan pembobotan sebagai berikut:

NKA Satker		
NKA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:		
Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
	1. Penggunaan SBK	10
Efisiensi (25)	2. Efisiensi SBK	15

Realisasi indikator NKPA tahun 2024 sebesar 96,06 atau tercapai 120% dari target (Gambar 4).

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tahun 2024 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 26.077.000 dengan realisasi anggaran 100%.

Gambar 4
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2024 Balai KIPM Mataram

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi
				Capaian RO	Penggunaan SBK
1	58738	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	96,06	100,00	73,70

Perbandingan capaian indikator pada tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi IK10

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi TW Sblumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian thd Target TW IV	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK 2024	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	-	-	-	-	-	71	96,06	120	96,06	71	120	-	71	120

Ket.: Tahun 2020 tidak terdapat IKU tersebut

IKPI. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
- ✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- ✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA \text{ Rev} = IKPA \text{ Rev} = \frac{\sum_{i=1}^n RRev_i}{n}$$

Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- ✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- ✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- ✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%

- ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
- ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulan

$$NKPA_n = \frac{(PA_n)}{(TP_n)} \times 100$$

Pengelolaan UP - Bobot 10%

$$\frac{\sum SPM \text{ GUP yang disampaikan tepat waktu}}{\sum SPM \text{ GUP}} \times 100$$

Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,
- ✓ Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

- ✓ Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK\ ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- ✓ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- ✓ RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \frac{Capaian\ RO}{Target\ RO}}{n} \right)$$

- ✓ Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Perhitungan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran telah dilakukan secara otomatis pada Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Capaian indikator ini dihitung semesteran.

Realisasi indikator ini pada Semester I Tahun 2023 tercapai 98,06 dari target 82 atau dengan persentase sebesar 119,59%.

Pada Semester II tahun 2023, indikator ini semula ditargetkan sebesar 89, tetapi pada Perubahan Perjanjian Kinerja, indikator ini terjadi perubahan target Semester II menjadi 93,75 dan tercapai sebesar 97,84 atau 104,36%.

Tahun 2024 indikator Nilai IKPA ditargetkan 83 pada Semester I dan pada Semester II 93,76.

Triwulan II tahun 2024 atau semester I tahun 2024 Nilai IKPA Balai KIPM Mataram tercapai 89,54 atau mencapai 107,88% dari target dan pada triwulan IV atau semester II tahun 2024 tercapai 94,92 (Gambar 5) dengan persentase capaian 101,24%.

Gambar 5

Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2024 Balai KIPM Mataram

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II MATARAM

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	038	032	567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	Nilai	100.00	81.35	93.65	0.00	0.00	100.00	100.00	75.93	80%	0.00		94.92
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	12.20	18.73	0.00	0.00	10.00	25.00					
					Nilai Aspek	90.68		90.83				100.00					

Indikator Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 24.283.000 dengan realisasi anggaran Rp. 24.281.979 atau setara dengan 99,99%.

Perbandingan capaian indikator pada tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.15 Target dan Realisasi IK I

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi TW Sblmnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian thd Target TW IV	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK 2024	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
96,68	95,98	98,18	96,71	97,84	-	93,76	94,92	101,24	94,92	93,76	101,24	88	90	105,47

IKI2. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Indikator Persentase Penyelesaian Temuan BPK ditargetkan tahunan dengan target 100% dan diukur dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram}} \times 100\%$$

Selama Tahun 2024 tidak ada audit BPK di Balai KIPM Mataram. Jadi, capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100%. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2023.

Perbandingan capaian indikator ini pada tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.16 Target dan Realisasi IK12

Realisasi					Tahun 2024								Renstra 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi TW Sblmnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian thd Target TW IV	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK 2024		Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
0	-	-	0	100%	100	100	100	100	100	100	100		-	100	100

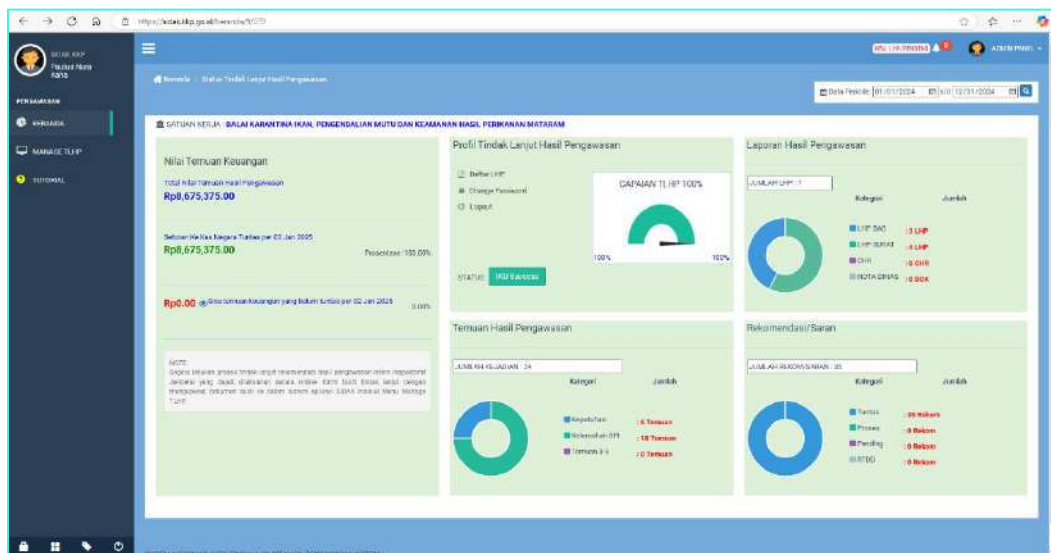
Ket. : Tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat IKU tersebut

IK13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Definisi IKU ini adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai KIPM Mataram yang menjadi objek pengawasan.

Realisasi indikator ini pada triwulan IV tahun 2023 adalah 100% dari target 75% atau tercapai 120%. Sedangkan realisasi pada triwulan IV tahun 2024 adalah 100% dari target 80% atau tercapai 120% sebagaimana tampilan pada dashboard Aplikasi Sidak KKP sesuai Gambar 6 berikut.

Gambar 6
Persentase TLHP Balai KIPM Mataram sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024



Rumus Perhitungan :

$$= \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP

Penghitungan Realisasi Triwulan IV tahun 2024:

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti = 0

$\sum N$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP = 0

$$= \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\% = 1 \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan capaian indikator sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Target dan Realisasi IK13

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi TW Sblmnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian thd Target TW IV	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK 2024	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	100	100	100	100	100	80	100	120	0	80	120	82	88	120

Ket.: Tahun 2019 tidak terdapat IKU tersebut

IK14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup BPPMHKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa diukur diperoleh berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP lingkup BPPMHKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

Tingkat kepatuhan PBJ UPT BPPMHKP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Pengukuran indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara tahunan dengan target 80% dan realisasi sebesar 84,34% atau tercapai 105,43% pada tahun 2024.

Sedangkan realisasi indikator ini pada tahun 2023 sebesar 78,26 dari target 77,5 atau tercapai 100,98%.

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 49.948.500 atau tercapai 99,90%.

Perbandingan capaian indikator pada tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.18 Target dan Realisasi IK14

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi TW Sblumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian thd Target TW IV	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target
-	-	-	79,56	78,26	-	80	84,34	105,43	84,34	80	105,43	-	80	105,43

Ket.: Tahun 2019 s.d. 2021 tidak terdapat IKU tersebut

IK15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT Balai KIPM Mataram

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup UPT BPPMHKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada lingkup UPT BPPMHKP dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:

- Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (25%)
- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%)
- Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%)

Pengukuran indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dilakukan secara tahunan dengan target 80% dan realisasi 97,50% atau tercapai 120% pada tahun 2024.

Sedangkan realisasi indikator ini pada tahun 2023 sebesar 99,70 dari target 77,5 atau tercapai 120%.

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 11.650.000 dengan realisasi anggaran 100%.

Perbandingan capaian indikator pada tahun 2024 dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, pada triwulan dan tahunan berjalan serta Renstra 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.19 Target dan Realisasi IKI5

Realisasi					Tahun 2024							Renstra 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi TW Sblumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian thd Target TW IV	Kenaikan thd TW sblmnya	Target PK 2024	% Realisasi thd Target PK 2024	Target 2020	Target 2024	% Capaian thd Target
-	-	-	100	99,70	-	80%	97,50%	120	97,50%	80%	120	-	80	120

Ket.: Tahun 2019 s.d. 2021 tidak terdapat IKU tersebut

3.3. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Balai KIPM Mataram, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-032.13.2.567758/2024 tanggal 24 November 2023 dengan Nilai Anggaran sebesar Rp 5.474.560.000 dimana sumber dananya berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp 5.436.391.000 dan PNPB sebesar Rp 38.169.000.

Selama Triwulan I Tahun 2024 telah terjadi 3 kali revisi DIPA. Revisi ke-1 pada tanggal 15 Januari 2024 yaitu revisi perubahan pagu berupa pengurangan pagu (Realokasi Anggaran Perkarantinaan Ikan) dengan pagu awal Rp.10.152.200.000 menjadi Rp.5.474.560.000. Revisi ke 2 pada tanggal 25 Januari 2024 yaitu revisi Blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp.298.400.000 dengan pagu anggaran tetap. Revisi ke 3 pada tanggal 16 Februari 2024 yaitu revisi administrasi berupa perubahan Rencana Penarikan Dana (Revisi Halaman III DIPA) dengan tidak mengubah pagu anggaran satker.

Pada Triwulan II tahun 2024 terdapat satu kali revisi yaitu Revisi ke-4 (Revisi Kanwil) pada tanggal 4 April 2024 yaitu revisi administrasi berupa perubahan Rencana Penarikan Dana (Revisi Halaman III DIPA) dengan tidak mengubah pagu anggaran satker.

Pada Triwulan III tahun 2024 terdapat satu kali revisi yaitu Revisi ke-5 (Revisi DJA) pada tanggal 23 Juli 2024 yaitu revisi terkait SOTK baru BPPMHKP dan adanya penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp.604.897 dan belanja barang sebesar Rp.11.265.000.

Pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 terdapat empat kali revisi yaitu Revisi ke-6 yaitu revisi administrasi berupa perubahan Rencana Penarikan Dana (Revisi Halaman III DIPA) dengan tidak mengubah pagu anggaran satker. Revisi ke-7 yaitu revisi penambahan pagu belanja pegawai sebesar Rp.83.822.000 dan pengurangan belanja barang sebesar Rp.181.640.000. Revisi ke-8 pemblokiran anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.23.861.000. Revisi ke-9 merupakan revisi penyelesaian pagu minus belanja pegawai dan revisi administrasi berupa pemutakhiran data POK.

Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Mataram sampai triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp 5.927.477.668 atau mencapai 98,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp 5.992.904.000 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.21 dan Tabel 3.21 sebagai berikut untuk setiap kegiatan dan jenis belanja.

Dari Laporan Realisasi Penerimaan PNB, jumlah total penerimaan PNB sampai triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp 88.475.000 dari target Rp 120.000.000 atau mencapai 73,73%. Realisasi PNB tahun 2024 tidak dapat mencapai target karena terkait adanya reorganisasi BKIPM menjadi BPPMHKP sehingga terjadi pengurangan PNB karena penarikan PNB untuk BKHIT yang merupakan PNB Karantina. Pencapaian PNB tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 3.20 Penyerapan Anggaran per Nama Kegiatan Triwulan IV T.A 2024

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Dukungan manajemen internal lingkup BKIPM Mataram	5.447.689.000	5.408.210.993	99,28
2	Pengendalian mutu	431.715.000	406.999.437	94,28
3	Manajemen mutu	113.500.000	112.267.238	98,91
TOTAL		5.992.904.000	5.927.477.668	98,81

Tabel 3.21 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan IV T.A 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	3.082.305.000	3.079.229.503	99,90
2	Belanja Barang	2.910.599.000	2.848.248.165	97,86
3	Belanja Modal	0	0	0
TOTAL		5.992.904.000	5.927.477.668	98,81

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Mataram Triwulan IV Tahun 2024 menyajikan perkembangan capaian sasaran kegiatan Balai KIPM Mataram selama dan/atau sampai triwulan IV tahun 2024 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Berdasarkan hasil analisis hasil penilaian kinerja, Balai KIPM Mataram telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan program untuk mencapai sasaran. Sesuai dengan pengukuran kinerja terlihat bahwa target-target dari sasaran yang ingin dicapai sampai dengan triwulan IV tahun 2024 telah tercapai.

Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)/Skor Kinerja sebesar 114,41 dengan indikator warna biru yang berarti dalam kategori “ISTIMEWA” pada Aplikasi Kinerja KKP.

Pada triwulan IV tahun 2024 yaitu bulan Oktober, terkait SOTK baru BPPMHKP sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsi BPPMHKP, maka terjadi perubahan beberapa indikator kinerja baik dalam hal uraian ataupun targetnya. Sehingga mengakibatkan perubahan dokumen kinerja terutama Perjanjian Kinerja yang mengalami revisi pada bulan Oktober 2024.

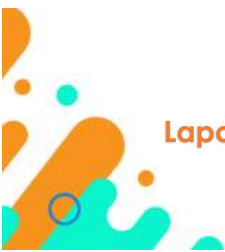
Pada Perjanjian Kinerja (PK) sebelumnya jumlah indikator kinerja kegiatan berjumlah 17 IKU. Setelah mengalami revisi jumlah indikator menjadi 15 IKU. Dari 15 indikator kinerja di tahun 2024 tersebut seluruh pencapaiannya memenuhi dan/atau melebihi target.

Namun, realisasi PNBK tahun 2024 tidak dapat mencapai target karena terkait adanya reorganisasi BKIPM menjadi BPPMHKP sehingga terjadi pengurangan PNBK karena penarikan PNBK untuk BKHIT yang merupakan PNBK Karantina

Demikian Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Balai KIPM Mataram disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja di lingkup Balai KIPM Mataram dan data dukung pengukuran kinerja di BPPMHKP.



LAMPIRAN - LAMPIRAN





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ni Luh Anggra Lasmika**
Jabatan : Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Mataram

Ni Luh Anggra Lasmika

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Mataram (%)	70
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Balai KIPM Mataram	6	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Inovasi)	1
		7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Mataram (Indeks)	3,36
		8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Indeks)	86
		9	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	82
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	71
		11	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Mataram (Nilai)	93,76
		12	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	100
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	80
		14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	80
		15	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.300.507.000
2.	Manajemen Mutu	358.500.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	431.715.000
Total Anggaran Balai KIPM Mataram Tahun 2024		6.090.722.000

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Mataram



Ni Luh Anggra Lasmika

IK.1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPIB kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)

CBIB

Target Sertifikat CBIB = 0

Capaian Sertifikat CBIB = 0

Persentase Capaian (A) = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

CPIB

Target Sertifikat CPIB = 1 sertifikat

Capaian Sertifikat CPIB = 1 sertifikat

Persentase Capaian (B) = $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

CPPIB

Target Sertifikat CPPIB = 0

Capaian Sertifikat CPPIB = 0

Persentase Capaian (C) = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

CPOIB

Target Sertifikat CPOIB = 0

Capaian Sertifikat CPOIB = 0

Persentase Capaian (D) = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

CDOIB

Target Sertifikat CDOIB = 0

Capaian Sertifikat CDOIB = 0

Persentase Capaian (E) = $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$

CPIB Kapal

Target Sertifikat CPIB Kapal = 4 sertifikat

Capaian Sertifikat CPIB Kapal = 4 sertifikat

Persentase Capaian (F) = $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%}{6} \times 100\%$$

$$= 100\% \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Mataram, 2 Januari 2025

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan,
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ikan,



Ni Luh Anggra Lasmika

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan



REKAPITULASI SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB) BALAI KIPM MATARAM TAHUN 2024

NO.	NAMA UNIT USAHA	PEMILIK	TELEPON	ALAMAT	NIB	JENIS PRODUK	TANGGAL INSPEKSI	TANGGAL SERTIFIKAT	MASA BERLAKU
1	PT ANUGRAH AGUNG SUMBAWA	BASIR	082341910268	Dusun Luk karya, Kel. Luk, Kec. Rhee, Sumbawa - NTB	3007240072068	BENIH UDANG VANNAMEE	4 NOVEMBER 2024	24 NOVEMBER 2024	24 NOVEMBER 2028



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Mataram, 2 Januari 2025
Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Ni Luh Anggra Lasmika

REKAPITULASI INSPEKSI CPIB KAPAL BALAI KIPM MATARAM TAHUN 2024

NO.	NAMA KAPAL	PEMILIK	TELEPON	ALAMAT	KELENGKAPAN						TANGGAL INSPEKSI	INSPEKTUR MUTU
					PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN	SERTIFIKAT PELATIHAN CPIB	SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN INSPEKSI PENGENDALIAN MUTU	SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN (SKKP)	BUKU KAPAL PERIKANAN ELEKTRONIK (E-BKP)		
1	CINTA MEKKAH 03	BASIR	082341910268	Kampung Turingan, Rt.003/Rw.000, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB	NOMOR : 33.24.0001.105.61934	NOMOR : 02.24.01.0000.16595	V	V	No. B.12533/DJPT.3/PI.210/III/20 24	A019176	9 DESEMBER 2024	DIAN NOPERTA A.
2	PERMATA MERAH 01	SYAMSIR		Kampung Mandar, Rt.003/Rw.002, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB	NOMOR : 33.24.0001.105.58187	NOMOR : 02.23.01.0000.12467	V	V	No. B.16435/DJPT.3/PI.210/VIII/2 024	A014214	9 DESEMBER 2024	DIAN NOPERTA A.
3	DOA SUCI	IRWAN TO		Kampung Mandar, Rt.008/Rw.001, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB	NO. 33.24.0001.105.58425	NOMOR : 02.23.01.0000.13893	V	V	No. B.11849/DJPT.3/PI.210/II/202 4	A015587	10 DESEMBER 2024	DIAN NOPERTA A.
4	HARAPAN BARU LB 04	IBRAHIM	085339963669	Kampung Sasak, Rt.000/Rw.000, Desa Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB	NOMOR : 33.24.0001.105.58282	NOMOR : 02.23.01.0000.13903	V	V	No. B.12086/DJPT.3/PI.210/IX/20 23	A016149	10 DESEMBER 2024	DIAN NOPERTA A.

KET. **HARDCOPY** SERTIFIKAT CPIB KAPAL MASIH DALAM PROSES PENGIRIMAN DARI PUSAT PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU PRODUKSI PRIMER



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Mataram, 2 Januari 2025
Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan

Ni Luh Anggra Lasmika



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
CERTIFICATE OF GOOD HATCHERY PRACTICES

Diberikan kepada :
This is to certify that

Nama Unit Usaha : PT. Anugrah Agung Sumbawa
The Hatchery Enterprise

Nomor Induk Berusaha : 3007240072068
Business Identification Number 3007240072068

Alamat : Dusun Luk Karya, Kel. Luk, Kec. Rhee.
Address Sumbawa – Nusa Tenggara Barat
Luk Karya Village. Kel. Luk, Kec. Rhee. Sumbawa
– West Nusa Tenggara.

Jenis Produk : Benih Udang Vannamae
Commodity Shrimp seeds

Tanggal Inspeksi : 4 November 2024
Inspection date November 4th, 2024

Masa Berlaku s.d Tanggal : 25 November 2028
Valid Until November 25th, 2028

telah memenuhi persyaratan **Cara Pembenihan Ikan Yang Baik** dengan nilai :
has fulfilled the **Good Hatchery Practices** requirements with grade

BAIK
GOOD

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in Jakarta
Pada Tanggal : 25 November 2024
Date November 25th, 2024

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini

Sertifikat ini berlaku selama 4 tahun sejak tanggal dikeluarkan
The Certificate is valid for 4 year after issued date

ID - CPIB - P - 52 -240004

IK.2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)

A = Persentase Penerbitan Sertifikat HACCP ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di UPI skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

HACCP

Target Sertifikat HACCP = 20 sertifikat

Capaian Sertifikat HACCP = 53 sertifikat

$$\text{Persentase Capaian (A)} = \frac{53}{20} \times 100\% = 265\%$$

SKP

Target Sertifikat SKP = 13 sertifikat

Capaian Sertifikat SKP = 52 sertifikat

$$\text{Persentase Capaian (B)} = \frac{52}{13} \times 100\% = 400\%$$

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{A+B}{xn} \times 100\% \\ &= \frac{265\%+400\%}{2} \times 100\% \\ &= 332,5\% \times 100\% \\ &= 332,5\%\end{aligned}$$

Mataram, 2 Januari 2025

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

M. Farchan

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ikan,



Ni Luh Anggra Lasmika



Target HACCP dan SKP dalam RKAKL

	- Transport	1.0 OK	2,010,000	2,010,000		
3989.PDC	Sertifikasi Produk[Base Line]	33.0 produk, Sertifikat		40,000,000		
3989.PDC.001	Lokasi : KOTA MATARAM					
051	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	20.0 produk		20,000,000		
A	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI			20,000,000	U	
	Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang diterbitkan			20,000,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			20,000,000		RM
	(KPPN.038-Mataram)					
	- Inspeksi HACCP Kab Lotim (2 Lok), Lobar (1 Lok), Loteng (1 Lok)	4.0 OK	440,000	1,760,000		
	> Perdin Noreg (2 Org)			3,940,000		
	- Transport	1.0 OK	3,940,000	3,940,000		
	> Perdin HACCP Dasar (2 Org)			9,500,000		
	- UH Fullboard	2.0 OH	180,000	360,000		
	- UH Luar Kota	4.0 OH	530,000	2,120,000		
	- Transport	2.0 OK	3,510,000	7,020,000		
	> Inspeksi HACCP Kab Sumbawa			1,600,000		
	- Hotel	1.0 OH	500,000	500,000		
	- UH Luar Kota (2 hari)	2.0 OH	440,000	880,000		
	- Transport	1.0 OK	220,000	220,000		
	> Verifikasi HACCP Kab Sumbawa (2 Org)			3,200,000		
	- Hotel	2.0 OH	500,000	1,000,000		
	- UH Luar Kota (2 hari)	4.0 OH	440,000	1,760,000		
	- Transport	2.0 OK	220,000	440,000		
3989.PDC.002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	13.0 produk		20,000,000		
051	Validasi produk pada sektor produksi pasca panen			20,000,000	U	
A	Sertifikasi Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen			20,000,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			20,000,000	A	RM
	(KPPN.038-Mataram)					
	- Perdin Inspeksi Sertifikat Kelayakan Kapal (SKP) (3 Org x 4 Lok)	12.0 OK	400,000	4,800,000		
	- Perdin Verifikasi Sertifikat Kelayakan Kapal (SKP) (2 Org x 7 Lok)	14.0 OK	400,000	5,600,000		
	- Perdin Inspeksi Sertifikat Pengelolaan Distribusi Ikan yang Baik (SPDI) (3 Org x 4 Lok)	12.0 OK	400,000	4,800,000	*	
	- Perdin Verifikasi Sertifikat Pengelolaan Distribusi Ikan yang Baik (SPDI) (3 Org x 4 Lok)	12.0 OK	400,000	4,800,000	*	

HACCP

Rekapitulasi Capaian Sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk pada UPI per UPT Periode sampai dengan B 12 DESEMBER Tahun 2024

No	Nama Satker	Target	Jumlah Sertifikat HACCP Yang Diterbitkan di 2024	Jumlah Sertifikat HACCP 2023 yang telah dilaksanakan Monev di 2024	Total Sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk pada UPI	%	Konfirmasi Status
1	Balai Besar KIPM Jakarta I	246	111	305	416	169,11%	
2	Balai Besar KIPM Makassar	345	128	264	392	113,62%	
3	Balai KIPM Ambon	30	17	23	40	133,33%	
4	Balai KIPM Balikpapan	15	7	10	17	113,33%	
5	Balai KIPM Banjarmasin	15	1	18	19	126,67%	
6	Balai KIPM Denpasar	190	51	164	215	113,16%	
7	Balai KIPM Entikong	10	7	12	19	190,00%	
8	Balai KIPM Jakarta II	325	176	350	526	161,85%	
9	Balai KIPM Jayapura	2	3	0	3	150,00%	
10	Balai KIPM Lampung	40	8	43	51	127,50%	
11	Balai KIPM Manado	90	50	45	95	105,56%	
12	Balai KIPM Mataram	20	24	29	53	265,00%	
13	Balai KIPM Medan I	40	36	20	56	140,00%	
14	Balai KIPM Semarang	230	123	141	264	114,78%	
15	Balai KIPM Surabaya I	420	141	333	474	112,86%	
16	Balai KIPM Surabaya II	220	123	112	235	106,82%	
17	Balai KIPM Tanjungpinang	65	36	66	102	156,92%	
18	Balai KIPM Tarakan	30	6	20	26	86,67%	
19	Stasiun KIPM Aceh	30	15	19	34	113,33%	
20	Stasiun KIPM Bandung	20	8	12	20	100,00%	
21	Stasiun KIPM Batam	35	21	10	31	88,57%	
22	Stasiun KIPM Bau-Bau	8	1	0	1	12,50%	
23	Stasiun KIPM Bengkulu	1	3	2	5	500,00%	
24	Stasiun KIPM Bima	1	1	3	4	400,00%	
25	Stasiun KIPM Cirebon	60	23	93	116	193,33%	
26	Stasiun KIPM Gorontalo	6	0	8	8	133,33%	
27	Stasiun KIPM Jambi	2	2	2	4	200,00%	
28	Stasiun KIPM Kendari	20	24	26	50	250,00%	
29	Stasiun KIPM Kupang	20	26	7	33	165,00%	
30	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	11	3	12	15	136,36%	
31	Stasiun KIPM Mamuju	2	2	2	4	200,00%	
32	Stasiun KIPM Medan II	205	102	152	254	123,90%	
33	Stasiun KIPM Merak	11	5	17	22	200,00%	
34	Stasiun KIPM Merauke	3	0	4	4	133,33%	
35	Stasiun KIPM Padang	3	0	5	5	166,67%	
36	Stasiun KIPM Palangkaraya	1	0	1	1	100,00%	
37	Stasiun KIPM Palembang	4	1	5	6	150,00%	
38	Stasiun KIPM Palu	5	1	4	5	100,00%	
39	Stasiun KIPM Pangkalpinang	70	15	55	70	100,00%	
40	Stasiun KIPM Pekanbaru	30	8	13	21	70,00%	
41	Stasiun KIPM Pontianak	6	11	12	23	383,33%	
42	Stasiun KIPM Sorong	17	9	9	18	105,88%	
43	Stasiun KIPM Tahuna	6	0	3	3	50,00%	
44	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	60	33	46	79	131,67%	
45	Stasiun KIPM Temate	20	1	18	19	95,00%	
46	Stasiun KIPM Yogyakarta	10	5	8	13	130,00%	
Jumlah		3000	1368	2503	3871	129,03%	

**DATA SKP YANG TELAH TERBIT
PERTANGGAL 7 OKTOBER 2024 - 31 DESEMBER 2024
BPPMHKP MATARAM**

NO	NAMA UPI	RUANG LINGKUP - NAMA		NO. SERTIFIKAT	TGL TERBIT	GRADE	ALAMAT
		UMUM	ENGLISH				
52	<u>SINAR SELATAN</u>	Daging Rajungan Rebus Dingin	Chilled Cooked Crabmeat	35017/52/SKP/LN/XII /2024	24-12-2024	C	Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
51	<u>UD. DUA PUTRI</u>	Lobster Hidup	Live Lobster	35016/52/SKP/LN/XII /2024	24-12-2024	B	Telong-Elong, Kel. Jerowaru, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
50	<u>UD. SINAR FAJAR</u>	Ikan Demersal Segar (Kakap Merah)	Fresh Demersal Fish (Red Snapper)	35015/52/SKP/SG/XII /2024	24-12-2024	B	JL SALEH Sungkar Pondok Prasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
49	<u>MAIQ MANGET</u>	Sambal Ikan asin	Salted Fish Chili Paste	35014/52/SKP/LN/XII /2024	24-12-2024	B	Dusun Otak Dese Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
48	<u>UD. ST FISH</u>	Ikan Demersal Beku (Kerapu, Kakap, Kurisi)	Frozen Demersal Fish (Grouper, Snapper, Treadfin Bream)	35007/52/SKP/BK/XII /2024	24-12-2024	A	Jl. Ireng Raya No. 2, Ireng Lauk, , Kel. Jatisela, Kec. Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
47	<u>MAIQ MANGET</u>	Abon Ikan	Shredded Fish	34791/52/SKP/LN/XII /2024	13-12-2024	B	D Dusun Otak Dese Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
46	<u>POKLAHSAR BUNGA MEKAR</u>	Ikan Pindang	Boiled Fish	34790/52/SKP/LN/XII /2024	13-12-2024	C	Dusun Kongok, Desa Meninting, Kel. Meninting, Kec. Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Nusa

							Tenggara Barat
45	<u>SETIA KAWAN</u>	Ikan Asap	Smoked Fish	34788/52/SKP/AS/XII/2024	13-12-2024	B	Batu Rimpang Desa Dane Rase, Kec. Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
44	<u>SETIA KAWAN</u>	Cumi Asap	Smoked Squid	34787/52/SKP/AS/XII/2024	13-12-2024	B	Batu Rimpang Desa Dane Rase, Kec. Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
43	<u>UD. LEBANGAN SAKTI</u>	Ikan Pelagis Beku (Layang)	Frozen Pelagic Fish (Shortfin Scad)	34786/52/SKP/BK/XII/2024	13-12-2024	B	Jalan Dermaga , Desa/Kelurahan Tanjung Luar, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
42	<u>UD. SINAR FAJAR</u>	Ikan Pelagis Fillet Beku (Marlin)	Frozen Fillet Pelagic Fish (Marlin)	34751/52/SKP/BK/XII/2024	11-12-2024	B	JL SALEH Sungkar Pondok Prasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
41	<u>UD. SINAR FAJAR</u>	Fillet Ikan Demersal Beku (Kakap)	Frozen Demersal Fish Fillet (Snapper)	34750/52/SKP/BK/XII/2024	11-12-2024	B	JL SALEH Sungkar Pondok Prasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
40	<u>UD. SINAR FAJAR</u>	Ikan Demersal Beku (Kakap)	Frozen Demersal Fish (Snapper)	34749/52/SKP/BK/XII/2024	11-12-2024	B	JL SALEH Sungkar Pondok Prasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
39	<u>UD. SINAR FAJAR</u>	Fillet Ikan Pelagis Segar	Fresh Pelagic Fish Fillet	34748/52/SKP/SG/XII/2024	11-12-2024	B	JL SALEH Sungkar Pondok Prasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
38	<u>UD. SINAR FAJAR</u>	Ikan Pelagis Segar (Tenggiri)	Fresh Pelagic Fish (Spanish Mackerel)	34702/52/SKP/SG/XII/2024	09-12-2024	B	JL SALEH Sungkar Pondok Prasi Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
37	<u>POKLAHSAR</u>	Cephalopoda	Frozen Raw	34514/52/SKP/BK/XI/	21-11-2024	B	Dusun Jambu Barat, Desa Labuhan Jambu,

	<u>MAURAYA JAYA</u>	Mentah Beku (Sotong, Gurita, Cumi-cumi)	Cephalopods (Cuttlefish, Octopus, Squid)	2024			Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat
36	<u>POKLAHSAR MAURAYA JAYA</u>	Ikan Pelagis Beku (Baby Tuna, Tongkol, Kuwe, Kembung, Layang, Tenggiri)	Frozen Pelagic Fish (Baby Tuna, Bullet Tuna, Giant Trevally, Indian Mackerel, Shortfin Scad, Spanish Mackerel)	34513/52/SKP/BK/XI/2024	21-11-2024	B	Dusun Jambu Barat, Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat
35	<u>UD. ST FISH</u>	Ikan Pelagis Beku (Baby Tuna, Tongkol, Kuwe, Kembung, Lemadang, Layang, Cakalang, Tuna)	Frozen Pelagic Fish (Baby Tuna, Bullet Tuna, Giant Trevally, Indian Mackerel, Mahi-mahi, Shortfin Scad, Skipjack, Tuna)	34371/52/SKP/BK/XI/2024	13-11-2024	A	Jl. Ireng Raya No. 2, Ireng Lauk, , Kel. Jatisela, Kec. Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
34	<u>UD. ST FISH</u>	Fillet Ikan Demersal Beku (Kerapu, Kakap)	Frozen Demersal Fish Fillet (Grouper, Snapper)	34370/52/SKP/BK/XI/2024	13-11-2024	A	Jl. Ireng Raya No. 2, Ireng Lauk, , Kel. Jatisela, Kec. Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
33	<u>UD. ST FISH</u>	Ikan Pelagis Fillet Beku (Kuwe, Lemadang, Tuna)	Frozen Fillet Pelagic Fish (Giant Trevally, Mahi-mahi, Tuna)	34369/52/SKP/BK/XI/2024	13-11-2024	A	Jl. Ireng Raya No. 2, Ireng Lauk, , Kel. Jatisela, Kec. Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
32	<u>UD. ST FISH</u>	Cephalopoda Beku (Sotong, Gurita, Cumi-	Frozen Cephalopods (Cuttlefish,	34368/52/SKP/BK/XI/2024	13-11-2024	A	Jl. Ireng Raya No. 2, Ireng Lauk, , Kel. Jatisela, Kec. Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat

		cumi)	Octopus, Squid)				
31	<u>UD. ST FISH</u>	Crustacea Beku	Frozen Crustacea	34367/52/SKP/BK/XI/2024	13-11-2024	A	Jl. Ireng Raya No. 2, Ireng Lauk, , Kel. Jatisela, Kec. Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
30	<u>AMERTHA BAHARI</u>	Kerupuk Ikan	Fish Crackers	34366/52/SKP/LN/XI/2024	13-11-2024	C	Dusun Transad Dusun Purwakarya , Kel. Padak Guar, Kec. Sambelie, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
29	<u>AMERTHA BAHARI</u>	Bakso Goreng Ikan	Fried Fish Ball	34365/52/SKP/SR/XI/2024	13-11-2024	C	Dusun Transad Dusun Purwakarya , Kel. Padak Guar, Kec. Sambelie, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
28	<u>Koperasi. BERTUK SAKAR</u>	Nila Berbumbu	Seasoning Tilapia	34330/52/SKP/LN/XI/2024	12-11-2024	B	Bunkate Timuk, Kel. Bunkate, Kec. Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
27	<u>AMERTHA BAHARI</u>	Kerupuk Cumi	Squid Crackers	34321/52/SKP/KR/XI/2024	11-11-2024	C	Dusun Transad Dusun Purwakarya , Kel. Padak Guar, Kec. Sambelie, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
26	<u>ULUAN BERSATU</u>	Ikan Pindang	Boiled Fish	34310/52/SKP/LN/XI/2024	11-11-2024	C	Uluan Desa Prabu Kecamatan Pujut, Kel. Prabu, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
25	<u>UD. BANDAR MUDA</u>	Ikan Pelagis Beku (Layang)	Frozen Pelagic Fish (Shortfin Scad)	34291/52/SKP/BK/XI/2024	11-11-2024	B	KebunTalo, Desa/Kelurahan Ampenan Utara, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
24	<u>POKLAHSAR PUTRI NYALE</u>	Terasi Udang Kering	Dried Shrimp Paste	34243/52/SKP/FR/XI/2024	06-11-2024	C	Jor Timur, Kel. Jerowaru, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

23	<u>ULUAN BERSATU</u>	Ikan Bakar	Grilled Fish	34238/52/SKP/LN/XI/2024	06-11-2024	C	Uluan Desa Prabu Kecamatan Pujut, Kel. Prabu, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
22	<u>UD. MOOA</u>	Ikan Pelagis Beku (Cakalang)	Frozen Pelagic Fish (Skipjack)	34123/52/SKP/BK/X/2024	30-10-2024	B	Dusun Kampung Baru Selatan Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kab Lombok Timur , Nusa Tenggara Barat
21	<u>Koperasi. AMALIAH ABADI SEJAHTERA</u>	Ikan Pelagis Beku (Baby Tuna, Lemuru, Tongkol, Layang, Cakalang, Tuna)	Frozen Pelagic Fish (Baby Tuna, Bali Sardinella, Bullet Tuna, Shortfin Scad, Skipjack, Tuna)	34107/52/SKP/BK/X/2024	29-10-2024	B	Jl. Tongkol Pangkalan PPI Tanjung, Kel. Tanjung, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima Nusa Tenggara Barat
20	<u>UD. BERKAT DOA IBU 2</u>	Ikan Pelagis Beku (Layang)	Frozen Pelagic Fish (Shortfin Scad)	34105/52/SKP/BK/X/2024	29-10-2024	B	Jalan Tunggal Kayun, Desa/Kelurahan Dayan Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
19	<u>UD. DOA IBU</u>	Ikan Pelagis Beku (Layang)	Frozen Pelagic Fish (Shortfin Scad)	34104/52/SKP/BK/X/2024	29-10-2024	B	Jalan Kambung gang mawar no. 5, Desa/Kelurahan Bintaro, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
18	<u>UD. ARES</u>	Keripik Rumput Laut	Seaweed Chip	34051/52/SKP/LN/X/2024	19-10-2024	B	Jl. DR. Soetomo Gg. Gili Gede 1 No. 3 , Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
17	<u>UD. ARES</u>	Rengginang Rumput Laut	Seaweed Thick Crackers	34050/52/SKP/LN/X/2024	19-10-2024	B	Jl. DR. Soetomo Gg. Gili Gede 1 No. 3 , Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
16	<u>SRIKANDI</u>	Abon Ikan Nila	Shredded Tilapia	34028/52/SKP/LN/X/2024	11-10-2024	B	Dusun Koloh Motong, Kel. Lenek, Kec. Lenek, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

15	<u>LAKARA SALWA</u>	Terasi Udang	Fermented Shrimp	34026/52/SKP/FR/X/ 2024	11-10-2024	B	Kp Baru, Kel. Labuhan LOMBOK, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
14	<u>POKLAHSAR SINAR TIMUR</u>	Dodol Rumput Laut	Seaweed Jelly	34013/52/SKP/LN/X/ 2024	11-10-2024	B	Dusun Kampung Tengah, Kel. Tanjung Luar, Kec. Keruak, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
13	<u>MANDIRI</u>	Kerupuk Rumput Laut	Seaweed Crackers	34012/52/SKP/LN/X/ 2024	11-10-2024	B	Lingkungan Kebon Talo, Kel. Selong, Kec. Selong, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
12	<u>MANDIRI</u>	Kerupuk Ikan Rumput Laut	Fish Seaweed Crackers	34011/52/SKP/SR/X/ 2024	11-10-2024	B	Lingkungan Kebon Talo, Kel. Selong, Kec. Selong, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
11	<u>MANDIRI</u>	Kerupuk Cumi	Squid Crackers	34010/52/SKP/KR/X/ 2024	11-10-2024	B	Lingkungan Kebon Talo, Kel. Selong, Kec. Selong, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
10	<u>SEJAHTERA</u>	Abon Ikan Cakalang	Shredded Skipjack Fish	34009/52/SKP/KR/X/ 2024	11-10-2024	B	Dusun Menanga Baris, Kel. Gunung Malang, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
9	<u>SEJAHTERA</u>	Abon Ikan Tuna	Shredded Tuna	34008/52/SKP/KR/X/ 2024	11-10-2024	B	Dusun Menanga Baris, Kel. Gunung Malang, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
8	<u>POKLAHSAR BERSATU</u>	Ikan Asap	Smoked Fish	34007/52/SKP/AS/X/ 2024	11-10-2024	B	Toron RT 001 RW 001, Kel. Kerumut, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
7	<u>CHARITY FOOD</u>	Snack Rumput Laut	Seaweed Snack	33978/52/SKP/LN/X/ 2024	10-10-2024	A	Jl. Bina Putra Blok B No 5, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat

6	<u>CHARITY FOOD</u>	Minuman Rumput Laut	Seaweed Drink	33945/52/SKP/LN/X/2024	10-10-2024	A	Jl. Bina Putra Blok B No 5, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
5	<u>POKLAHSAR MUNAZI JAYA</u>	Abon Ikan	Shredded Fish	33944/52/SKP/LN/X/2024	10-10-2024	B	Dusun Pondok Buak, Kel. Batu Kumbung, Kec. Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
4	<u>POKLAHSAR MUNAZI JAYA</u>	Kerupuk Ikan	Fish Crackers	33943/52/SKP/LN/X/2024	10-10-2024	B	Dusun Pondok Buak, Kel. Batu Kumbung, Kec. Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
3	<u>POKLAHSAR MUNAZI JAYA</u>	Pilus Ikan	Fish Pilus	33942/52/SKP/KR/X/2024	10-10-2024	B	Dusun Pondok Buak, Kel. Batu Kumbung, Kec. Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
2	<u>POKLAHSAR MUNAZI JAYA</u>	Nugget Ikan	Fish Nugget	33941/52/SKP/SR/X/2024	10-10-2024	A	Dusun Pondok Buak, Kel. Batu Kumbung, Kec. Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
1	<u>PADE GEGER</u>	Produk Perikanan Bernilai Tambah Beku	Frozen Value Added Fish Product	33940/52/SKP/BK/X/2024	10-10-2024	B	KP. Muhajirin Pancuran, Kel. Rumbuk, Kec. Sakra, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

Mataram, 31 Desember 2024

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan
Mataram



Ni Luh Anggra Lasmika, S.St.Pi.,M.Tr.Pi.

IK.3 Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup UPT Balai KIPM Mataram (%)

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

%X = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI

A = Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP = 5 kabupaten/kota

B = Jumlah kabupaten/kota yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP = 5 kabupaten/kota

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$= \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Mataram, 2 Januari 2025

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,



M. Farchan



Ni Luh Anggra Lasmika

LAPORAN PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN LINGKUP BALAI KIPM MATARAM

Periode : II Tahun 2024

Triwulan : IV (Empat)

Capaian

No.	Kabupaten/Kota Lokasi Pengawasan Mutu	Lokus Pengawasan							
		UPI		Pasar Modern		Pasar Tradisional		Pelabuhan Perikanan	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Kota Mataram	-	-	2	2	1	1	-	-
2	Kabupaten Lombok Barat	-	-	-	-	3	3	-	-
3	Kabupaten Lombok Timur	1	1	-	-	-	-	1	1
4	Kabupaten Lombok Tengah	-	-	-	-	2	2	-	-
5	Kabupaten Sumbawa	-	-	-	-	1	1	-	-



Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Mataram,

M. Farchan

Mataram, 2 Januari 2025

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan
Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan

Ni Luh Anggra Lasmika

IK.4 Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor (%)

$$\%X = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

%X = Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP Mataram = 90 HC Mutu

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan = 0 (tidak ada yang ditolak)

$$\%X = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

$$= \frac{90-0}{90} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,



M. Farchan

Mataram, 2 Januari 2025

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan,
Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ikan,

Ni Luh Anggra Lasmika

**IK.5 Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi
Lingkup Balai KIPM Mataram**

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

%X = Persentase Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi

A = Persentase Nilai Penerapan ISO 17020 = 81,35%

B = Persentase Nilai Penerapan ISO 17025 = 84,85%

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{A+B}{2} \times 100\% \\ &= \frac{81,35\%+84,85\%}{2} \times 100\% \\ &= 83,10\%\end{aligned}$$

Mataram, 2 Januari 2025

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode
Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan,



M. Farchan



M. Farchan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor : B.32/BPPMHKP.2/TU.210/I/2025 10 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Capaian IKU Sistem
Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan
Lembaga Inspeksi lingkup UPT BPPMHKP

Yth. Seluruh Kepala UPT BPPMHKP

Sehubungan telah selesainya kegiatan Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan capaian indikator kinerja utama terkait nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup UPT BPPMHKP, sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar **81,35** didapatkan dari 13 laboratorium;
2. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sebesar **84,85** didapatkan dari 14 lembaga inspeksi;
3. Berdasarkan data pada poin 1 dan poin 2 maka capaian indikator kinerja utama Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP sebesar **83,10**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Manajemen Mutu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariat

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 3374/SJ.7/TU.210/IX/2024

Yth. : 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal/ Badan dan
2. Inspektur I,II,III,IV
Dari : Kepala Pusat Data Statistik, dan Informasi
Hal : Penyampaian Berita Acara Pleno Penilaian Proposal Inovasi
Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun
2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 5 September 2024

1. Menindaklanjuti telah selesainya kegiatan penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dan telah disahkannya Berita Acara Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik pada kegiatan yang dilaksanakan tanggal 7 s.d 9 Agustus 2024 di Hotel Santika Batam Jl. Engku Putri No.9, Tlk. Tering, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau 29464 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Tim Penilai Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat sebanyak 61 proposal inovasi pelayanan publik. Masing-masing proposal dinilai oleh 2 (dua) penilai dan berdasarkan pleno penilaian, Tim penilai memilih 15 proposal inovasi terbaik yaitu:

No	Eselon I	Nama UPP	Nama Inovasi
1	DJPT	Balai Besar Penangkapan Ikan	BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan)
2	DJPKRL	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	KADO SPESIAL (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut)
3	DJPDSPKP	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	INVAPRO KAPE (Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan)
4	DJPT	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	TERJALA (Integrasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Data)
5	BPPMHKP	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkal Pinang	JAGA SI CEKATAN (Jejaring Gabungan Reaksi Cepat Kelautan dan Perikanan) Inovasi Non Digital Cepat Viral

6	DJPT	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	SELASIH (Sistem Informasi Pelayanan Air Bersih)
7	DJPB	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	SiPATIN (Sistem Pelayanan Terintegrasi)
8	BPPMHKP	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram	Si Chupang New (Aplikasi Cukup Mudah dan Gampang New)
9	DJPT	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpan dan	SILAUT (Sistem Integrasi Layanan Usaha Terpadu)
10	DPSDKP	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	UBI KUPAS (Laut Bersih, Kumpul Sampah dan Plastik)
11	DJPKRL	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Taman Karang Piracora
12	DJPDSPKP	Dit. Pemasaran	KURAS IKAN (Kurasi Produk Perikanan Untuk UMKM Naik Kelas)
13	BPPSDM	Politeknik KP Sidoarjo	Aplikasi PENTARU: Penerimaan Taruna Baru (Efektif, Efisien, Transpran
14	DJPB	BPBAP Takalar	Bibit Rumput Laut Kualitas Unggul (Biru LautKu)
15	BPPSDM	BDA Sukamandi	<i>Learning Management System Electronic Millenial Learning (E-MILEA)</i>

- b) Proposal yang menjadi top 15, kami ajukan untuk mendapat penghargaan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada kegiatan Adi Bakti Mina Bahari;
- c) Seluruh Unit Pelayanan Publik yang telah mengajukan proposal inovasi kepada tim penilai baik level 2 maupun 1, dapat mengunduh sertifikat sebagai peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 melalui link berikut: <https://bit.ly/sertifikipp24>;
- d) Secara umum dapat kami sampaikan hasil penilaian atas 61 Proposal sebagai berikut:

No	Eselon I	Jumlah Proposal yang disubmit	Target	Realisasi IKU	Persentase Capaian (%)
1.	DJPKRL	4 Proposal	76	84.26	110.87
2.	DJPT	6 Proposal	76	87.31	114.88
3.	DJPB	14 Proposal	76	76.07	100.10
4.	DJPDSPKP	5 Proposal	76	85.26	112.18
5.	DJPSDKP	8 Proposal	76	81.13	106.75
6.	BPPSDMKP	12 Proposal	76	80.24	105.57
7.	BPPMHKP	12 Proposal	76	80.31	105.68
Total		61 Proposal	76	80.78	106.30

Keterangan:

Nilai yang diinput pada aplikasi kinerjaku adalah realisasi IKU

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Aulia Riza Farhan

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal dan
2. Inspektur Jenderal.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

BERITA ACARA HASIL SIDANG PLENO
PENILAIAN PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

Nomor : B.893/SJ/TU.220/VIII/2024

Tanggal : 09 Agustus 2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (09-08-2024), telah dilaksanakan Rapat Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 yang dilaksanakan secara luring di Hotel Santika Batam. Kami selaku Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, telah melakukan penilaian terhadap proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terdapat 61 (enam puluh satu) proposal inovasi yang diajukan oleh Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

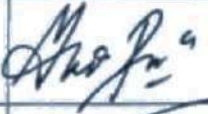
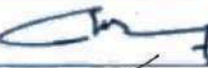
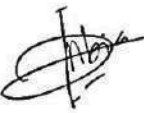
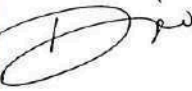
No	Eselon I	Unit Pelayanan Publik	Judul Inovasi
1	DJPKRL	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Gerei Pelayanan Sini Situ
2	DJPKRL	LKKPN Pekanbaru	KADO SPESIAL (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut)
3	DJPKRL	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Sila Dalipatik "Aksi Kolaboratif Pengendalian Sampah Plastik"
4	DJPKRL	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Taman Karang Piracora
5	DJPT	BBPI	BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan)

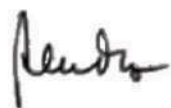
No	Eselon I	Unit Pelayanan Publik	Judul Inovasi
			Ikan Berbasis Resiko, Post Audit dan Terintegrasi)
29	DJPDSPKP	Dit. Pemasaran	KURAS IKAN (Kurasi Produk Perikanan Untuk UMKM Naik Kelas)
30	DPSDKP	Direktorat Pemantauan Operasi Armada	Kartu SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor)
31	DPSDKP	Sekretariat Direktorat Jenderal	SI IKAN GABUS (Sistem Informasi kenalkan Gaji Berkala Untuk pegawai Sejahtera)
32	DPSDKP	Pangkalan PSDKP Jakarta	SIPINTER (Sistem Pelayanan Informasi Terpadu)
33	DPSDKP	Stasiun PSDKP Cilacap	CEKATAN (Cek Kapal Tanpa Antrean) Lebih Dekat, Lebih Cepat di Stasiun PSDKP Cilacap
34	DPSDKP	Stasiun PSDKP Belawan	SILVER (Sistem Informasi LVHPI Terpadu)
35	DPSDKP	Stasiun PSDKP Tahuna	UBI KUPAS (Laut Bersih, Kumpul Sampah dan Plastik)
36	DPSDKP	Stasiun PSDKP Ambon	SAMANDAR (Sistem Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan secara Daring) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
37	DPSDKP	Stasiun PSDKP Biak	Biak GO Link (Web Site Pelayanan Satu Link yang Dapat Mengakses Semua Web yang Digunakan Pelaku Usaha/Pengurus Kapal)
38	BPPSDMKP	LPTK	SI MARIBAJO (Sistem Informasi Kelautan untuk Nelayan Tradisional)
39	BPPSDMKP	BRBIH	LOCA FEED: Low Carbon Feed
40	BPPSDMKP	BP3 Medan	SIAPP BOSS: Sarana Informasi Aksi Pelayanan Publik BPPP Medan One Stop Service
41	BPPSDMKP	BP3 Ambon	Tabea Pelaut: Tanpa Biaya dan Antrean Lama Pendaftaran Pelatihan Kepelautan
42	BPPSDMKP	BP3 Banyuwangi	SI PANDA Aplikasi Pemeriksaan Buta Warna Digital)
43	BPPSDMKP	BP3 Bitung	BPPP Bitung <i>Mobile</i>
44	BPPSDMKP	BP3 Tegal	SILANGIT: Sistem Informasi Layanan Terintegrasi
45	BPPSDMKP	Politeknik KP Bitung	PIOnS: <i>Polytechnic Integrated Online System</i>
46	BPPSDMKP	SUPM Ladong	SIUSUPM: Sistem Ujian Sekolah Usaha Perikanan Menengah
47	BPPSDMKP	BPPSDM	SFV (SMART Fisheries Village)

2. Telah dilakukan penilaian proposal inovasi pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dan pengusulan pemberian penghargaan bagi inovasi yang menjadi Top 15 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

No	Eselon I	Nama UPP	Nama Inovasi
1	DJPT	Balai Besar Penangkapan Ikan	BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan)
2	DJPKRL	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	KADO SPESIAL (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut)
3	DJPDSPKP	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	INVAPRO KAPE (Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan)
4	DJPT	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	TERJALA (Integrasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Data)
5	BPPMHKP	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkal Pinang	JAGA SI CEKATAN (Jejaring Gabungan Reaksi Cepat Kelautan dan Perikanan) Inovasi Non Digital Cepat Viral
6	DJPT	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	SELASIH (Sistem Informasi Pelayanan Air Bersih)
7	DJPB	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	SiPATIN (Sistem Pelayanan Terintegrasi)
8	BPPMHKP	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram	Si Chupang New (Aplikasi Cukup Mudah dan Gampang New)
9	DJPT	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpan dan	SILAUT (Sistem Integrasi Layanan Usaha Terpadu)
10	DPSDKP	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	UBI KUPAS (Laut Bersih, Kumpul Sampah dan Plastik)
11	DJPKRL	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Taman Karang Piracora
12	DJPDSPKP	Dit. Pemasaran	KURAS IKAN (Kurasi Produk Perikanan Untuk UMKM Naik Kelas)
13	BPPSDM	Politeknik KP Sidoarjo	Aplikasi PENTARU: Penerimaan Taruna Baru (Efektif, Efisien, Transpran)

MENYETUJUI,
TIM PENILAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	Aulia Riza Farhan, S.T., M.Sci.Tech., Ph.D, PIt. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi	Ketua	
2	Mareta Nirmalanti, S.Pi, M.Si, Perencana Madya Pusat Data, Statistik, dan Informasi	Sekretaris	
3	Yudi Priatno, B.ENG, M.S.E, Pranata Komputer Ahli Madya, Pusat Data, Statistik, dan informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota	
4	Mohamad Armansyah, S.T., MAP, Pranata Komputer Ahli Madya, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota	
5	Supriyatun, S.St.Pi., M.A.B., Analis Kebijakan Muda, Pusat Data, Statistik, dan Informasi	Anggota	
6	Srianto, S.Pi., M.Ak, Auditor Muda, Inspektorat II	Anggota	
7	Reva Nathalie Imanda, S.E., Auditor Pertama, Inspektorat II	Anggota	
8	Dini Wulansari S.Pi, Analis Pelayanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Anggota	
9	Sukmarumaeti, S.Pi, M.M, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Anggota	
10	Ambia Rachman Haryadi, S.Kom., MMSI., Analis Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Anggota	
11	Dian Lestari Pujiastuti, S.St.Pi., M.M, Perencana Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Anggota	
12	Purihitajati Widodo, S.H., M.H., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota	
13	Kasmawati, SS, Pranata Humas Muda, Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota	

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
14	Endro Aribowo, S.E, PHPI Madya, Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Anggota	
15	Hendri,, S.Pi., M.Si Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Anggota	
16	Martono, S.Pi, Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Anggota	

Mengetahui,
Penanggung Jawab Tim Penilai
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024
Sekretaris Jenderal



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Lampiran

Nomor : B.893 /SJ.7/TU.220/VII/2024

Tanggal : 09 Agustus 2024

PROPOSAL YANG MEMENUHI KRITERIA PENILAIAN

No	Eselon I	No	Unit Pelayanan Publik	Judul Inovasi	Nilai
1	DJP KRL	1	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Gerei Pelayanan Sini Situ	71.95
		2	LKKPN Pekanbaru	KADO SPESIAL (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut)	98.30
		3	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Sila Dalipatik "Aksi Kolaboratif Pengendalian Sampah Plastik"	80.90
		4	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Taman Karang Piracora	85.90
2	DJPT	1	BBPI	BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan)	99.13
		2	PPS Cilacap	SRIKANDI (Sistem Monitoring Kapal Ikan)	85.33
		3	PPN Palabuhanratu	SIRATU (Sistem Informasi Layanan PPN Palabuhanratu)	76.48
		4	PPN Tanjungpandan	SILAUT (Sistem Integrasi Layanan Usaha Terpadu)	86.50
		5	PPN Pemangkat	TERJALA (Integrasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Data)	89.20
		6	PPP Teluk Batang	SELASIH (Sistem Informasi Pelayanan Air Bersih)	87.25
3	DJPB	1	BBPBAP Jepara	SIMPEL KONTEK 24 JAM (SISTEM INFORMASI PELAYANAN DAN KONSULTASI TEKNIS 24 JAM)	76.30
		2	BBPBAT Sukabumi	FORDISBAT (Form Diseminasi Budidaya Air Tawar)	76.75
		3	BBPBAT Sukabumi	SILUBAT (Sistem Informasi Laboratorium Budidaya Air Tawar)	73.73
		4	BPBAP Takalar	SIKEPITING (Sistem Informasi Kinerja Pelayanan	62.50

No	Eselon I	No	Unit Pelayanan Publik	Judul Inovasi	Nilai
				Berintegritas Inovatif No Gratifikasi)	
		5	BPBAP Takalar	Biru LautKu (Bibit Rumput Laut Kualitas Unggul)	85.62
		6	BPBAP Takalar	UVTA (Ultraviolet Tambak)	78.03
		7	BPBAP Ujung Batee	SIPPUTERI (Sistem Pelayanan Publik Terintegrasi)	70.15
		8	BPBAT Mandiangin	SIMITA (Sistem Pembenihan Tanpa Artemia)	78.93
		9	BPBAT Sei Gelam	PUSTINA (Patin Unggul Sakti Nusantara)	80.18
		10	BPBL Batam	SIMAPRO (SISTEM INFORMASI PELAYANAN ROBOTIK)	74.73
		11	BLUPPB Karawang	SiPATIN (Sistem Pelayanan Terintegrasi)	86.88
		12	BPIUUK Karangasem	SIGAP (Sistem InteGrasi Administrasi Pelayanan)	79.78
		13	BPKIL Serang	SMART KIT	74.88
		14	BPBAT Tatelu	SI-PAYANGKA (Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi, Aktual dan Akuntabel)	66.33
4	DJPDSPKP	1	Dit. Logistik	STELINA (Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional)	85.13
		2	Dit. PBM	GELATIN - Gerai Layanan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan Ikan	85.28
		3	BPPPKP	INVAPRO KAPE (Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan)	93.08
		4	Dit. Usaha dan Investasi	Si Ikan Berprotein (Sistem Perizinan Berusaha Pengolahan Ikan Berbasis Resiko, Post Audit dan Terintegrasi)	76.98
		5	Dit. Pemasaran	KURAS IKAN (Kurasi Produk Perikanan Untuk UMKM Naik Kelas)	85.83
5	DPSDKP	1	Direktorat Pemantauan Operasi Armada	Kartu SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor)	78.43
		2	Sekretariat Direktorat Jenderal	SI IKAN GABUS (Sistem Informasi kenalKAN Gaji Berkala Untuk pegawai Sejahtera)	85.33
		3	Pangkalan PSDKP Jakarta	SIPINTER (Sistem Pelayanan Informasi Terpadu)	79.88
		4	Stasiun PSDKP Cilacap	CEKATAN (Cek Kapal Tanpa Antrean) Lebih Dekat, Lebih Cepat di Stasiun PSDKP Cilacap	84.45
		5	Stasiun PSDKP Belawan	SILVER (Sistem Informasi LVHPI Terpadu)	74.45
		6	Stasiun PSDKP Tahuna	UBI KUPAS (Laut Bersih, Kumpul Sampah dan Plastik)	86.38

No	Eselon I	No	Unit Pelayanan Publik	Judul Inovasi	Nilai
		7	Stasiun PSDKP Ambon	SAMANDAR (Sistem Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan secara Daring) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.	77.70
		8	Stasiun PSDKP Biak	Biak GO Link (Web Site Pelayanan Satu Link yang Dapat Mengakses Semua Web yang Digunakan Pelaku Usaha/Pengurus Kapal)	82.45
6	BPPSDMKP	1	LPTK	SI MARIBAJO (Sistem Informasi Kelautan untuk Nelayan Tradisional)	79.95
		2	BRBIH	LOCA FEED: Low Carbon Feed	84.58
		3	BP3 Medan	SIAPP BOSS: Sarana Informasi Aksi Pelayanan Publik BPPP Medan One Stop Service	83.60
		4	BP3 Ambon	Tabea Pelaut: Tanpa Biaya dan Antrean Lama Pendaftaran Pelatihan Kepelautan	78.20
		5	BP3 Banyuwangi	SI PANDA Aplikasi Pemeriksaan Buta Warna Digital)	81.80
		6	BP3 Bitung	BPPP Bitung <i>Mobile</i>	76.55
		7	BP3 Tegal	SILANGIT: Sistem Informasi Layanan Terintegrasi	76.80
		8	Politeknik KP Bitung	PIOnS: <i>Polytechnic Integrated Online System</i>	81.78
		9	SUPM Ladong	SIUSUPM: Sistem Ujian Sekolah Usaha Perikanan Menengah	64.88
		10	BPPSDM	SFV (SMART Fisheries Village)	83.70
		11	Politeknik KP Sidoarjo	Aplikasi PENTARU: Penerimaan Taruna Baru (Efektif, Efisien, Transparan)	85.63
		12	BDA Sukamandi	E-MILEA (Learning Management System Electronic Millennial Learning)	85.38
7	BPPMHKP	1	STASIUN KIPM PANGKAL PINANG	JAGA SI CEKATAN (Jejaring Gabungan Reaksi Cepat Kelautan dan Perikanan). Inovasi Non Digital Cepat Viral	87.25
		2	BALAI KIPM BALIKPAPAN	IKAN LAIS (APLIKASI KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN SERTIFIKASI)	80.30
		3	BALAI KIPM MATARAM	Si Chupang New (Aplikasi Cukup Mudah dan Gampang New)	86.88
		4	STASIUN KIPM MERAUKE	Portal SiimutMerauke	78.20

No	Eselon I	No	Unit Pelayanan Publik	Judul Inovasi	Nilai
		5	BALAI KIPM MANADO	Fin Tuna (Fasilitas Inovasi Teknologi Untuk layanan): Solusi Digital Terintegrasi untuk Pelayanan Prima BKIPM Manado	82.38
		6	BALAI KIPM SURABAYA I	INOVASI PELAYANAN PUBLIK BALAI KIPM SURABAYA I PANCEN OKE (Pelayanan Praktis, Cepat, Efisien dan OKE)	81.98
		7	STASIUN KIPM MERAK	SIMPUH SAKTI (Sistem InforMasi Pelaku UsaHa ekSpor hAsil periKanan Tiada hentI)	82.13
		8	STASIUN KIPM KUPANG	IMPLEMENTASI DAN KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN SKUTER (Sistem layanan eKspres Untuk pelinTas pERbatasan)	80.30
		9	BALAI KIPM DENPASAR	SIWAYAN SADAR DIRI (Sistem PengaWAsan dan PelaYANan Terintegrasi KawaSAn BanDARa dengan Data Informasi Riil)	73.90
		10	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	MPOK SITI (Media Pelayanan Online Karimutu Simpel Terintegrasi)	80.83
		11	STASIUN KIPM PALANGKARAYA	Si Cantik (Sistem Informasi Cermat, Akuntabel Dan Simpatik) yang di perbarui menjadi SAMPULIR (Sistem Pelayanan Sertifikasi Mutu Perikanan dari Hulu ke Hilir) pada BPPMHKP/SKIPM Palangka Raya	77.00
		12	STASIUN KIPM TAHUNA	JETSKI	73.03

IK.7 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN UPT BALAI KIPM MATARAM (NILAI INDEKS)

Tabel 1
Jumlah nilai perunsur dan Nilai Rata-rata (NRR) 9 Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Penilaian tentang kesesuaian persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan pada Balai KIPM Mataram.	3.91	90
2.	Penilaian mengenai kemudahan prosedur yang dijalani untuk mendapatkan layanan pada Balai KIPM Mataram.	3.91	90
3.	Penilaian mengenai kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan dengan yang diinformasikan pada Balai KIPM Mataram.	3.91	90
4.	Penilaian mengenai kesesuaian biaya pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan.	3.87	89
5.	Pemahaman tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan Balai KIPM Mataram.	3.96	91
6.	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan.	3.83	88
7.	Kemudahan dalam penggunaan fitur pada aplikasi sistem layanan.	3.87	89
8.	Penilaian tentang kualitas isi/konten dari aplikasi sistem layanan.	3.91	90
9.	Penilaian Bapak/Ibu mengenai layanan konsultasi dan pengaduan yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengadu/tindak lanjut) pada Balai KIPM Mataram.	4.00	92

Tabel 2
Kategorisasi Kepuasan Pelayanan

Nilai Persepsi	Interval Indeks Persepsi	Konversi Interval Indeks Persepsi	Kinerja Unit Pelayanan
1	3,1 - 4,0	88,31 – 100,00	(A) Sangat baik
2	2,1 - 3,0	76,61 – 88,30	(B) Baik
3	1,1 - 2,0	65,00 – 76,60	(C) Kurang baik
4	0,1 - 1,0	25,00 – 64,99	(D) Tidak baik

←

↺

https://ptsp.kkp.go.id/skmv/p/laporan_rekap_upp_unsur_v/2024/4

🔍

☆

⚙

🌟

⋮

Susan KKP

⋮

Balai KIPM Mataram

Dashboard

Mapping Data

Laporan

- Data Detail
- Rekap per UPP per Unsur
- Rekap SKM per Layanan
- Rekap SKM per UPP
- Rekap SKM per Eselon
- Upload Laporan Menerv
- Resume Laporan Menerv

PAGES

Download

Profile

Logout

Laporan SKM Resume

Home / Laporan / Rekapitulasi per UPP per Layanan

Data IKM

Triwulan 42024Submit

Data Rekap per UPP per Layanan Tw 4/2024

Download Data

10 entries per page

Search...

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Nama Layanan	Jml Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	SKM
bkipm	Balai KIPM Mataram	2024	4	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	7	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00
bkipm	Balai KIPM Mataram	2024	4	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	16	3.88	3.88	3.88	3.81	3.94	3.75	3.81	3.88	4.00	3.87	96.70

←

↺

https://ptsp.kkp.go.id/skmv/p/laporan_rekap_upp_v/2024/4

🔍

☆

⚙

🌟

⋮

Susan KKP

⋮

Balai KIPM Mataram

Dashboard

Mapping Data

Laporan

- Data Detail
- Rekap per UPP per Unsur
- Rekap SKM per Layanan
- Rekap SKM per UPP
- Rekap SKM per Eselon
- Upload Laporan Menerv
- Resume Laporan Menerv

PAGES

Download

Profile

Logout

Laporan SKM Detail

Home / Laporan / Rekapitulasi per UPP

Data IKM

Triwulan 42024Submit

50 Data terakhir Tw 4/2024, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel

Download Data

10 entries per page

mataram

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bkipm	Balai KIPM Mataram	2024	4	4.91	97.71	23

Showing 1 to 1 of 1 entries

Download Data

**HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TRIWULAN IV Tahun 2024**

Unit Pelayanan : Balai KIPM Mataram
Alamat : Jl. Adisucipto, Kel. Pejajaran, Kec. Ampenan - Mataram

Jumlah Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	3	4	3	3	4	3	3	4	4
6	3	3	4	3	4	3	3	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	3	3	4	4	3	4	3	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	90	90	90	89	91	88	89	90	92
N.Rata-rata	3.91	3.91	3.91	3.87	3.96	3.83	3.87	3.91	4.00
NRR Tertimbang	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44	0.43	0.43	0.43	0.44
					</				

Keterangan :

U1 - U14 : Unsur-unsur pelayanan

NRR : Nilai Rata-rata

IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat

: Jumlah NRR IKM Tertimbang

$$= \text{Jumlah NRR Tertimbang} \times 25$$

NBR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi

Jumlah kuesioner yang terisi

NRR Tertimbang : $\text{NRR per unsur} \times 0.111111111$

Per Unsir

IKM UNIT PELAYANAN : 97.71

Mutu Pelayanan

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00

B (Baik)	: 76,61 - 88,30
----------	-----------------

C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60

D (Tidak Baik) : 25.00 - 64.99

Sangat Baik

No	Unsur Pelayanan
U1	Kesesuaian persyaratan
U2	Kemudahan prosedur
U3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian
U4	Kesesuaian biaya
U5	Kesesuaian produk
U6	Kecepatan respon dari aplikasi
U7	Kemudahan dalam menggunakan fitur
U8	Kualitas isi/konten
U9	Layanan konsultasi dan pendeuduan

$$\text{Nilai Indeks} = \frac{\text{Jumlah Nilai Rata-rata 9 Unsur Pelayanan}}{9 \text{ (Unsur Pelayanan)}} = \frac{3,91+3,91+3,91+3,87+3,96+3,83+3,87+3,91+4}{9} = \frac{35,17}{9} = \mathbf{3,91}$$

Mataram, 2 Januari 2025

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram,

Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial,

M. Farhan

I Putu Panca Yasa

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS

NOMOR : 132/BPPMHKP.1/KI.120/I/2025

Yth. : Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP
Dari : Sekretaris Badan PPMHKP
Sifat : Biasa
Hal : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan IV UPT BPPMHKP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 13 Januari 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat pengguna jasa layanan lingkup UPT BPPMHKP untuk Triwulan IV Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan terdapat satu UPT yaitu BPPMHKP Gorontalo yang melakukan SKM secara manual dengan menyebarkan kuesioner secara luring kepada pengguna jasa dikarenakan terdapat kendala teknis yang tidak dapat dihindari pada tenggat waktu pelaksanaan SKM. Sehingga terdapat perbedaan nilai SKM antara aplikasi susan <https://ptsp.kkp.go.id/> dan hasil perhitungan yang melibatkan seluruh UPT BPPMHKP dengan rincian sebagai berikut:

No	Nilai SKM	Keterangan
1	94,87	Perhitungan 46 UPT melalui aplikasi Susan dan 1 UPT (BKIPM Gorontalo) menggunakan metode luring secara
2	94,89	Nilai BPPMHKP pada https://ptsp.kkp.go.id/

Sehingga untuk nilai SKM yang menjadi capaian BPPMHKP pada TW IV tahun 2024 adalah 94,87 dengan rata-rata per unsur 3.79 (Rekapitulasi terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM

NOMOR : 95/BPPMHKP.1/KI.120/I/2025

Yth. : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Dari : Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Sifat : Biasa
Hal : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan IV UPT BPPMHKP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 9 Januari 2024

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat pengguna jasa layanan. Tim Kerja Pelayanan Publik, Sekretariat BPPMHKP sebagai penanggung jawab pelayanan publik lingkup BPPMHKP, telah melaksanakan SKM lingkup UPT BPPMHKP untuk Triwulan IV Tahun 2024 yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPPP). Berkenaan dengan pelaksanaan survei tersebut, bersama ini kami laporkan hal hal sebagai berikut :

1. Kegiatan ini dilaksanakan pada periode Oktober s.d Desember 2024 dengan ketentuan:
 - a. SKM dilakukan secara online melalui alamat website <http://ptsp.kkp.go.id/skm/login> yang dapat diakses langsung oleh pengguna jasa layanan;
 - b. SKM dilakukan terhadap setiap layanan yang diberikan oleh UPT BPPMHKP selaku unit penyelenggara pelayanan (UPP) secara *real time*;
 - c. Unsur yang dilakukan survei antara lain:
 - 1). Persyaratan,

- 2). Sistem, mekanisme, prosedur,
 - 3). Waktu penyelesaian,
 - 4). Biaya/tarif,
 - 5). Produk layanan,
 - 6). Perilaku pelaksana,
 - 7). Kompetensi pelaksana,
 - 8). Penanganan pengaduan, dan
 - 9). Sarana prasarana;
- d. Hasil pelaksanaan SKM dipublikasikan kepada publik melalui berbagai media yang dimiliki, seperti: sosial media, (Instagram, Facebook dan Twitter), website, leaflet, brosur, banner, dll.
2. Hasil pelaksanaan SKM periode Triwulan IV tahun 2024, sebagai berikut :
- a. Jumlah UPT BPPMHKP yang melaksanakan SKM periode Triwulan IV sebanyak **47 UPT (seluruh UPT)**;
 - b. Nilai rata-rata SKM dari seluruh UPT BPPMHKP periode Triwulan IV tahun 2024 adalah **94,87** dengan mutu pelayanan kategori mutu **“Sangat Baik”**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata SKM Triwulan IV Tahun 2024 sudah di atas target IKU yaitu nilai rata-rata SKM di 47 Satker/UPT BPPMHKP adalah $\geq 88,30$;
 - c. Jumlah UPT BPPMHKP yang mendapat nilai SKM dengan kategori sangat baik adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit kerja atau seluruh UPT BPPMHKP. Matriks hasil survei selengkapnya sebagaimana terlampir;
 - d. Nilai SKM 3 (tiga) UPT tertinggi:
 - i. Balai KIPM Balikpapan: 100,00
 - ii. Balai KIPM Ambon : 100,00
 - iii. Stasiun KIPM Padang : 100,00
 - e. Nilai SKM 3 (tiga) UPT terendah:
 - i. Balai Uji Standar KIPM : 88,82
 - ii. Stasiun KIPM Sorong : 89,07
 - iii. Stasiun KIPM Palu : 89,35

- f. Nilai rata-rata tiap unsur pelayanan untuk seluruh UPT BPPMHKP antara lain:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	Persyaratan	3,83
2	Sistem, Mekanisme & Prosedur	3,81
3	Waktu penyelesaian	3,76
4	Biaya/Tarif	3,80
5	Produk Spesifikasi jenis layanan	3,81
6	Kompetensi pelaksana	3,76
7	Perilaku Pelaksana	3,78
8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,81
9	Sarana dan Prasarana	3,79
Rata-Rata		3,79

3. Analisis hasil survei dan rencana tindak lanjut :

- Pada survei kepuasan masyarakat lingkup UPT BPPMHKP Triwulan IV tahun 2024 terdapat 2.457 responden jumlahnya menurun apabila dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2024 yaitu sebanyak 2.980. Nilai SKM pada Triwulan IV tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,34 dibandingkan nilai SKM pada Triwulan III tahun 2024 yaitu 93,53 naik menjadi 94,87;
- Selama Triwulan IV terdapat 2 (dua) UPT yang memiliki jumlah responden paling sedikit sebanyak 4 (empat) responden yaitu Balai KIPM Jayapura dan Stasiun KIPM Tahuna;
- Nilai unsur terendah yaitu waktu penyelesaian dan kompetensi pelaksana dengan nilai 3,76. Meskipun kompetensi petugas masih dalam kategori sangat baik namun pengguna jasa berharap petugas pelayanan selalu sigap dan responsif dalam melakukan pelayanan, serta mampu menyelesaikan pelayanan tepat waktu;
- Terdapat satu UPP yaitu SKIPM Gorontalo yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara manual dengan menyebarkan kuesioner secara luring kepada

pengguna jasa dikarenakan terdapat kendala teknis yang tidak dapat dihindari pada tenggat waktu pelaksanaan SKM;

e. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan nilai SKM antara lain:

i. Melakukan pembinaan kepada UPT BPPMHKP yang:

a) Nilai SKM dibawah target > 88,30; dan

b) Jumlah respondennya belum memadai.

ii. Melakukan perbaikan dan peningkatan pada unsur terendah yaitu kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana;

iii. Memastikan secara berkala bahwa setiap UPP melakukan SKM dan melaporkan hasilnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

iv. Melakukan internalisasi budaya pelayanan prima kepada seluruh petugas pelayanan BPPMHKP;

v. Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait penggunaan tools SUSAN KKP dalam melakukan survei kepuasan masyarakat;

vi. Melakukan penyegaran atau bimtek tentang peraturan perundang undangan yang terkait pelayanan pelayanan publik serta prinsip prinsip pelayanan prima.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan Ibu lebih lanjut.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hari Maryadi

Lampiran
Nomor : 95/BPPMHKP.1/KI.120/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

Tabel Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Unit Pelayanan BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2024

No.	UPT	Jumlah Responden	Nilai IKM (Rata-rata/ unsur)	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja UPP
1	Balai KIPM Balikpapan	35	4.00	100	A	Sangat Baik
2	Balai KIPM Ambon	8	4.00	100	A	Sangat Baik
3	Stasiun KIPM Padang	6	4.00	100	A	Sangat Baik
s4	Balai KIPM Jayapura	4	4.00	100	A	Sangat Baik
5	Stasiun KIPM Tahuna	4	4.00	100	A	Sangat Baik
6	Stasiun KIPM Ternate	86	3.99	99.74	A	Sangat Baik
7	Stasiun KIPM Pekanbaru	72	3.93	98.34	A	Sangat Baik
8	Stasiun KIPM Mamuju	7	3.92	98.02	A	Sangat Baik
9	Balai KIPM Banjarmasin	32	3.92	98	A	Sangat Baik
10	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	36	3.92	97.99	A	Sangat Baik
11	Balai KIPM Mataram	23	3.91	97.71	A	Sangat Baik
12	Stasiun KIPM Pontianak	60	3.91	97.69	A	Sangat Baik
13	Stasiun KIPM Yogyakarta	13	3.90	97.44	A	Sangat Baik
14	Stasiun KIPM Batam	19	3.89	97.37	A	Sangat Baik
15	Balai KIPM Tanjung Pinang	123	3.85	96.14	A	Sangat Baik
16	Stasiun KIPM Merauke	17	3.84	96.08	A	Sangat Baik
17	Balai KIPM Semarang	73	3.83	95.74	A	Sangat Baik
18	Balai KIPM Surabaya II	102	3.82	95.59	A	Sangat Baik
19	Stasiun KIPM Jambi	22	3.82	95.58	A	Sangat Baik
20	Stasiun KIPM Bandung	25	3.82	95.44	A	Sangat Baik

No.	UPT	Jumlah Responden	Nilai IKM (Rata-rata/ unsur)	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja UPP
21	Stasiun KIPM Cirebon	54	3.81	95.32	A	Sangat Baik
22	Stasiun KIPM Kendari	35	3.81	95.24	A	Sangat Baik
23	Stasiun KIPM Bengkulu	15	3.80	95	A	Sangat Baik
24	Stasiun KIPM Bima	32	3.80	94.97	A	Sangat Baik
25	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	64	3.78	94.62	A	Sangat Baik
26	Balai Besar KIPM Makassar	404	3.77	94.2	A	Sangat Baik
27	Balai KIPM Entikong	32	3.76	94.1	A	Sangat Baik
28	Balai KIPM Tarakan	6	3.76	93.98	A	Sangat Baik
29	Stasiun KIPM Palangkaraya	35	3.76	93.97	A	Sangat Baik
30	Balai KIPM Manado	45	3.74	93.46	A	Sangat Baik
31	Stasiun KIPM Palembang	67	3.73	93.33	A	Sangat Baik
32	Stasiun KIPM Bau-Bau	22	3.73	93.18	A	Sangat Baik
33	Balai KIPM Jakarta II	50	3.71	92.72	A	Sangat Baik
34	Balai KIPM Denpasar	264	3.70	92.5	A	Sangat Baik
35	Balai KIPM Surabaya I	90	3.69	92.16	A	Sangat Baik
36	Stasiun KIPM Aceh	12	3.66	91.44	A	Sangat Baik
37	Balai KIPM Lampung	29	3.65	91.28	A	Sangat Baik
38	Stasiun KIPM Medan II	100	3.63	90.83	A	Sangat Baik
39	Balai Besar KIPM Jakarta I	74	3.63	90.65	A	Sangat Baik
40	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	10	3.61	90.28	A	Sangat Baik
41	Balai KIPM Medan I	36	3.60	90.05	A	Sangat Baik
42	Stasiun KIPM Gorontalo	15	3.59	89.83	A	Sangat Baik
43	Stasiun KIPM Kupang	63	3.59	89.68	A	Sangat Baik
44	Stasiun KIPM Merak	11	3.58	89.39	A	Sangat Baik

No.	UPT	Jumlah Responden	Nilai IKM (Rata-rata/ unsur)	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja UPP
45	Stasiun KIPM Palu	6	3.57	89.35	A	Sangat Baik
46	Stasiun KIPM Sorong	76	3.56	89.07	A	Sangat Baik
47	Balai Uji Standar KIPM	43	3.55	88.82	A	Sangat Baik

BALAI KIPM MATARAM

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
1	BALAI KIPM MATARAM	16	21.81	87.24 %	39.41	98.52 %	27.5	91.67 %	5	100 %	93.73	SANGAT TINGGI



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

2 Januari 2025

Nomor : B.12/BPPMHKP.1/RC.610/I/2025
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2024 UPT Lingkup BPPMHKP

Yth.

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP;
2. Plt Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer, BPPMHKP;
3. Plt. Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen, BPPMHKP;
4. Kepala UPT lingkup BPPMHKP.

di
tempat

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta memperhatikan Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN RB Nomor B/65/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Poin 10 yang menyebutkan untuk mendorong peningkatan evaluasi AKIP internal unit organisasi Level II serta Surat Sekretaris BPPMHKP B.3977/BPPMHKP.1/RC.610/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP TA 2024 UPT Lingkup BPPMHKP, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi Kinerja dan Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP (yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/PedomanEvaluasiAKIP2024>) di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.
2. Target kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Tahun 2024 sebesar **Nilai 82, Sebanyak 40 UPT (80,40%) telah memenuhi target kinerja dan sisanya 10 UPT (19,60%) belum memenuhi target kinerja karena rendahnya capaian pada komponen Pelaporan Kinerja dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP per Satker (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP adalah sebagai berikut :

No.	Unit kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	Predikat
1	Sekretariat BPPMHKP	24.00	24.00	13.80	22.50	84.30	A
2	Pusat Manajemen Mutu	24.90	24.90	13.50	20.00	83.30	A
3	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	27.30	24.00	11.25	20.50	83.05	A
4	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen	27.30	24.00	11.25	20.50	83.05	A
5	BBKIPM Jakarta I	22.80	24.00	13.50	22.50	82.80	A
6	BBKIPM Makassar	25.50	25.50	12.30	20.50	83.80	A
7	BKIPM Denpasar	24.00	23.10	13.50	22.50	83.10	A
8	BKIPM Surabaya I	24.00	22.20	13.50	22.50	82.20	A
9	BKIPM Medan I	22.20	24.00	13.50	22.50	82.20	A
10	BKIPM Balikpapan	24.00	24.00	12.75	21.25	82.00	A
11	BKIPM Jayapura	22.50	23.70	12.00	16.00	74.20	BB
12	BKIPM Jakarta II	23.70	23.70	13.50	21.25	82.15	A
13	BKIPM Surabaya II	24.00	25.50	11.10	22.50	83.10	A
14	BKIPM Mataram	24.00	27.00	12.60	20.00	83.60	A
15	BKIPM Manado	24.90	24.00	12.00	22.50	83.40	A
16	BKIPM Semarang	27.00	24.00	12.00	21.25	84.25	A
17	BKIPM Banjarmasin	23.10	24.30	13.50	22.50	83.40	A
18	BKIPM Lampung	22.20	27.00	13.50	20.00	82.70	A
19	BKIPM Ambon	27.00	24.00	12.75	20.00	83.75	A
20	BKIPM Entikong	22.20	24.60	13.50	22.50	82.80	A
21	BKIPM Tanjung Pinang	22.20	24.00	10.35	21.00	77.55	BB
22	BKIPM Tarakan	24.00	24.00	12.00	22.50	82.50	A
23	BUSKI PM	24.00	27.00	13.50	20.00	84.50	A
24	SKIPM Palembang	24.00	25.20	11.10	22.50	82.80	A
25	SKIPM Bandung	26.10	25.20	12.60	19.75	83.65	A
26	SKIPM Merauke	23.70	23.70	11.10	18.75	77.25	BB
27	SKIPM Pontianak	22.20	25.50	13.50	22.50	83.70	A
28	SKIPM Kendari	24.00	23.70	13.05	20.25	81.00	A
29	SKIPM Batam	25.50	25.50	10.35	21.00	82.35	A
30	SKIPM Padang	19.80	27.00	13.50	22.50	82.80	A
31	SKIPM Jambi	24.00	25.50	12.60	21.25	83.35	A
32	SKIPM Palu	24.00	24.00	12.60	22.50	83.10	A
33	SKIPM Palangkaraya	24.00	24.00	12.30	22.50	82.80	A
34	SKIPM Kupang	24.00	25.50	11.40	22.50	83.40	A
35	SKIPM Pangkal Pinang	24.00	25.50	11.40	21.25	82.15	A
36	SKIPM Ternate	22.20	27.00	12.60	22.50	84.30	A
37	SKIPM Yogyakarta	26.10	24.60	11.85	20.50	83.05	A
38	SKIPM Aceh	24.00	27.00	12.00	22.50	85.50	A
39	SKIPM Gorontalo	24.60	24.00	12.75	21.25	82.60	A
40	SKIPM Pekanbaru	22.80	27.00	12.60	22.50	84.90	A
41	SKIPM Medan II	25.20	24.00	12.60	22.50	84.30	A

No.	Unit kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	Predikat
42	SKIPM Sorong	24.00	24.00	12.90	22.50	83.40	A
43	SKIPM Bengkulu	24.00	27.00	12.00	22.50	85.50	A
44	SKIPM Cirebon	24.00	27.00	12.00	22.50	85.50	A
45	SKIPM Luwuk Banggai	24.00	25.20	11.10	22.50	82.80	A
46	SKIPM Tanjung Balai Asahan	20.70	19.80	9.75	12.50	62.75	B
47	SKIPM Bima	22.20	24.00	12.60	22.50	81.30	A
48	SKIPM Tahuna	16.50	22.20	12.00	18.75	69.45	B
49	SKIPM Bau-Bau	24.00	24.30	12.15	21.00	81.45	A
50	SKIPM Merak	24.00	24.00	11.10	22.50	81.60	A
51	SKIPM Mamuju	27.00	24.00	11.10	18.50	80.60	A

- Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP untuk Satker lingkup yang telah mencapai target (**≥82 Nilai**) yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
- Selanjutnya setiap satuan kerja (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP, khususnya untuk 10 Satker dengan dibawah target (**≤82 Nilai**) diminta untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dan saran pada Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP dalam hal pengelolaan dan pelaporan kinerja agar dapat mencapai target indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP periode Tahun 2025;
- Rincian detail Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP UPT lingkup BPPMKHP Tahun 2024 dapat dilihat pada aplikasi Kinerjaku masing-masing satker.

Demikian disampaikan. atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Hari Maryadi

Tembusan :

- Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

←↻🏠

https://monov.kemenkeu.go.id/app2024/satker/nkasatker

88A☆⋮🌐

MONEV

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RelePilih TA (2024)Logout

NK Perencanaan Satuan Kerja

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan 11 entri

Cari:

No. ↑	Kode Satuan Kerja ↑	Satuan Kerja ↑	NK Perencanaan Anggaran ↑	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑	Penggunaan SBK ↑	Efisiensi SBK ↑
1	567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	96,06	100,00	100,00	73,79

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya1Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-03 09:05:56



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	038	032	567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	Nilai	100.00	81.35	93.65	0.00	0.00	100.00	100.00	75.93	80%	0.00	94.92
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.20	18.73	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.68		96.83				100.00				

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1628/ITJ.0/TU.210/IX/2024

Yth. : 1. Para Kepala Biro lingkup Sekretariat Jenderal
2. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
3. Para Sekretaris Ditjen lingkup KKP
4. Para Sekretaris Badan lingkup KKP
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI) dari Total Realisasi Anggaran KKP
Lampiran : -
Tanggal : 30 September 2024

Bersama ini disampaikan bahwa Itjen KKP telah melaksanakan pengukuran IKU Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI), dengan hasil sebesar 0,0939% dengan target kurang dari 1%. Nilai tersebut diperoleh dengan membagi besarnya nilai keuangan terhadap besarnya realisasi anggaran. Adapun rincian capaian tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Keuangan LK 2023 Lingkup KKP per 28 September 2024

No	Eselon I	Nilai Keuangan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Setjen	571,218,613.00	631,793,931,033.00	0.0904%
2	Ditjen PKRL	175,999,847.00	399,297,824,951.00	0.0441%
3	Ditjen PSDKP	1,118,316,959.00	1,119,216,743,475.00	0.0999%
4	Ditjen Perikanan Tangkap	568,110,399.00	842,679,861,445.00	0.0674%
5	Ditjen Perikanan Budidaya	647,733,195.00	1,087,136,906,277.00	0.0596%
6	BPPSDMKP	1,832,712,563.00	1,342,845,268,762.00	0.1365%
7	Ditjen PDSPKP	998,491,792.00	339,604,537,406.00	0.2940%
8	BPPMHKP	11,350,000.00	497,626,943,467.00	0.0023%
9	Itjen	23,878,250.00	75,393,908,501.00	0.0317%
	Jumlah	5,947,811,618.00	6,335,595,925,317.00	0.0939%

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal
2. Sekretaris Jenderal

ADMIN PANEL

Beranda / Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Date Period: 01/01/2024 s/d 12/31/2024

SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM

Nilai Temuan Keuangan

Total Nilai Temuan Hasil Pengawasan
Rp8,675,375.00

Setoran Ke Kas Negara Tuntas per 02 Jan 2025
Rp8,675,375.00

Prosentase: 100.00%

Rp0.00 Sisa temuan keuangan yang belum tuntas per 02 Jan 2025 0.00%

NOTE:
Segera lakukan proses tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang dapat dilaksanakan secara online. Kirim bukti tindak lanjut dengan mengupload dokumen bukti ke dalam sistem aplikasi SIDAK melalui Menu Manaja TLHP.

Profil Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

[Daftar LHP](#)
[Change Password](#)
[Logout](#)

CAPAIAN TLHP 100%

100% 100%

STATUS : **KU Success**

Laporan Hasil Pengawasan

Jumlah LHP : 7

Kategori	Jumlah
LHP BAB	: 3 LHP
LHP SURAT	: 4 LHP
CHR	: 0 CHR
NOTA DINAS	: 0 DOK

Temuan Hasil Pengawasan

Jumlah Kejadian : 24

Kategori	Jumlah
Kepatuhan	: 6 Temuan
Kelomahan SPI	: 18 Temuan
Temuan 3-E	: 0 Temuan

Rekomendasi/Saran

Jumlah Rekomendasi/Saran : 35

Kategori	Jumlah
Tuntas	: 35 Rekom
Proses	: 0 Rekom
Pending	: 0 Rekom
RTDD	: 0 Rekom



SIDAK KKP
ELYZAL ZABET,
S.E

PENGAWASAN

BERANDA

MANAGE TLHP

TUTORIAL



https://sidak.kkp.go.id/beranda/9

113%



SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN STATUS: SUKSES / PROGRES: 87.76%	PUSAT MANAJEMEN MUTU STATUS: FAILED / PROGRES: 76.71%	PUSAT PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU PRODUKSI PRIMER STATUS: FAILED / PROGRES: 60.00%
PUSAT PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU PRODUKSI PASCA PAVEN STATUS: NOT AVAILABLE	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR STATUS: SUKSES / PROGRES: 86.67%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG STATUS: SUKSES / PROGRES: 98.11%

Current temp
Near record



Search



1:44 PM
1/2/2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAR www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2024 10 Desember 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pengawasan Lainnya dalam rangka
Penilaian Efektivitas Pengawasan dan Kepatuhan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
Tahun 2024 lingkup BPPMHKP

Yth. Sekretaris BPPMHKP
di Jakarta

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan Pengawasan Lainnya dalam rangka Penilaian Efektivitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), sebagaimana Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor B.485/ITJ.4/KP.440/XI/ 2024, tanggal 28 November 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. Penilaian Efektivitas Pengawasan PBJ Tahun 2024 lingkup BPPMHKP dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 6 Desember 2024, terhadap 3 (tiga) komponen, dan memperoleh **nilai 91,98%** dari maksimum 100%. Hasil penilaian tersebut telah melebihi target Indikator Kinerja (IK) 8 pada Perjanjian Kinerja (PK) Itjen KKP Tahun 2024 yaitu Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP, serta IK 7 pada PK Inspektorat IV Tahun 2024 yaitu Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ lingkup Mitra Inspektorat IV, dengan target masing-masing sebesar 82%. Rincian penilaian efektivitas pelaksanaan pengawasan PBJ disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Kualitas Perencanaan Pengawasan	20	20,00
2	Kualitas Pelaksanaan Pengawasan	40	40,00
3	Nilai Rata-rata Tingkat kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP	40	31,98
Hasil Penilaian		100	91,98

Rincian Lembar Kerja Penilaian pada Tabel 1 terdapat pada Lampiran 1.

2. Penilaian Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024 sebesar **84,34%** dari maksimum 100%. Nilai tersebut telah melebihi target pada PK BPPMHKP Tahun 2024, yaitu pada IK 28, dengan target 80%. Rincian penilaian kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis BPPMHKP	10	10,00
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15	13,75
3	Persentase Pemilihan PBJ yang Dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE)	10	10,00
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45	31,84
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5	3,75
6	Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP pada Triwulan I s.d. III Tahun 2023	15	15,00
Hasil Penilaian		100	84,34

Rincian Lembar Kerja Penilaian pada Tabel 2 terdapat pada Lampiran 2.

Meskipun telah melebihi target IK pada PK, namun berdasarkan penilaian lebih lanjut terhadap pelaksanaan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024, diketahui hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Belum seluruh paket PBJ diumumkan dalam SIRUP

Rencana PBJ yang telah di-*input* pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) per Triwulan III Tahun 2024 hanya 2.777 Paket PBJ, senilai Rp184.082.331.000, atau 99,32% dari total 2.788 Paket PBJ yang harus di-*input* di SIRUP senilai Rp185.343.009.000,00.

2. Terdapat keterlambatan penyelesaian pengadaan dan pembayaran

a. Belanja Modal

Terdapat 2 (dua) paket PBJ senilai Rp256.777.989,00, dari total 14 paket PBJ senilai total Rp2.020.603.696,00 yang terlambat penyelesaian pekerjaannya dan belum terdapat realisasi pembayaran pada periode akhir tugas Tim, per tanggal 6 Desember 2024. Kontrak dimaksud, yaitu:

- 1) Kontrak Nomor B.01.12/PPK/BKIPM.JKTII/PL.410/XI/2024 untuk Pengadaan Alat Pengolah Data pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM)/PPMHKP Padang senilai Rp85.943.000,00 yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Pratama Solusindo, dengan periode akhir kontrak pada tanggal 29 November 2024; dan

2) Kontrak Nomor B.01.12/PPK/BKIPM.JKTII/PL.410/XI/2024 untuk Pengadaan Alat Pengolah Data senilai Rp161.180.000,00 yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Pratama Solusindo, dengan periode akhir kontrak pada tanggal 29 November 2024.

b. Belanja Barang/Jasa

Terdapat 1 (satu) paket PBJ senilai Rp120.900.000,00, dari total 95 paket PBJ senilai total Rp10.612.011.998,00, yang terlambat pembayarannya pada periode akhir tugas Tim, per tanggal 6 Desember 2024. Kontrak dimaksud bernomor B.216.C/PPK-BPPMHKP.3/PL.420/XI/2024 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa *Fullboard* oleh PT. Citra Cikopo Hotel, dengan periode akhir kontrak pada tanggal 26 November 2024.

Rincian PBJ (Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa) dapat diakses pada:

<https://docs.google.com/document/d/1xNYHbgXt8Jkjo7gP4ESb5RQJga0lQcuh/e/dit?usp=sharing&ouid=101693255689536754273&rtpof=true&sd=true>.

3. Belum seluruh hasil pengadaan sesuai *volume*

Berdasar hasil pengawasan Itjen KKP terhadap PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024, diketahui terdapat kekurangan *volume* hasil PBJ, yaitu:

- a. Pada Balai KIPM/PPMHKP Semarang, sesuai Surat Tugas Nomor B.358/ITJ.4/KP.440/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024, terdapat Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 014/PPK.BKIPM.SMG/SPK/PL.420/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024 senilai Rp47.307.201,89 oleh penyedia CV. Bangun Jaya, dengan kekurangan *volume* senilai Rp4.055.472,00;
- b. Pada Stasiun KIPM/PPMHKP Palangkaraya sesuai Surat Tugas Nomor B.456/ITJ.4/KP.440/XI/2024, tanggal 21 November 2024, terdapat:
 - 1) Pemeliharaan Kantor (perbaikan *plafond* dan dinding) sesuai SPK Nomor 126/KPA/PL.420/SKIPM.PKY/II/2024, tanggal 28 Februari 2024, senilai Rp14.430.000,00 oleh CV. Tata Bangun Konstruksi, dengan kekurangan *volume* senilai Rp913.000,00; dan
 - 2) Pemeliharaan Halaman Kantor (Perbaikan Lantai Teras Depan Kantor) sesuai SPK Nomor 206/KPA/SKIPM.PKY/PL.420/IV/2024, tanggal 30 April 2024, senilai Rp10.295.250,00, oleh CV. Seribu Dinar, dengan kekurangan *volume* senilai Rp875.000,00.

Berdasarkan konfirmasi dengan Analis Perencanaan, serta Ketua Tim Kerja (Katimja) Keuangan, Barang Milik Negara (BMN) dan Pengendalian Internal (PI) pada Sekretariat BPPMHKP, belum seluruh paket PBJ diumumkan dalam SIRUP dikarenakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja (Satker) lingkup BPPMHKP belum melakukan revisi RUP secara berkala setelah dilaksanakan revisi anggaran. Sedangkan keterlambatan pekerjaan dan kekurangan volume pekerjaan terjadi karena kekurangcermatan KPA dan PPK dalam mengendalikan kontrak.

Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan kepada Saudara agar menginstruksikan tertulis, kepada:

1. Seluruh KPA Satker lingkup BPPMHKP agar tertib dalam mengumumkan rencana pengadaan pada SIRUP dan menyelesaikan PBJ sesuai kontrak/surat pesanan tepat waktu; dan
2. PPK pada Stasiun KIPM/PPMHKP Palangkaraya dan Balai KIPM/PPMHKP Semarang agar cermat dalam mengendalikan kontrak dan segera menindaklanjuti rekomendasi Itjen KKP terkait kekurangan *volume* pada hasil pengawasan PBJ.

Terhadap saran di atas, telah terdapat kesanggupan tindak lanjut pada Minggu ke-3 Desember 2024, sesuai Dokumen Hasil Penilaian dan Kesanggupan Tindak Lanjut yang ditandatangani Katimja Keuangan, BMN dan PI per 4 Desember 2024 dan dapat diakses pada: https://drive.google.com/file/d/1DxozTWpFuUh-M6E8T_IPIUfXRvkOROnj/view?usp=sharing

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Inspektur Jenderal
Inspektur IV,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal
2. Inspektur II
3. Kepala BPPMHKP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

Nomor	: B.67/BPPMHKP.1/PL.760/I/2025	03 Januari 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 (Satu) lembar	
Hal	: Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Tahun 2024	

Yth.
Kepala UPT Lingkup BPPMHKP
di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Inspektur Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor T.553/ITJ.4/HP.660/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Penilaian Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Tahun 2024 pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut :

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing unit satker lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan parameter yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (12,5%)
 - b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
 - c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (25%)
 - d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%)
 - e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%)

2. Berdasarkan hasil evaluasi, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan secara umum mencapai dari target 80,00 %. Adapun rincian capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dari setiap satker lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan

Hari Maryadi

Lampiran I
 Nomor : B.67/BPPMHKP.1/PL.760/I/2025
 Tanggal : 31 Desember 2024

Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker lingkup BPPMHKP Tahun 2024

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
1	Pusat Manajemen Mutu	80,00 %	97,50 %	Tercapai
2	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	80,00 %	97,50 %	Tercapai
3	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen	80,00 %	97,50 %	Tercapai
4	Balai KIPM Jakarta II	80,00 %	97,50 %	Tercapai
5	Balai Uji Standar KIPM	80,00 %	97,50 %	Tercapai
6	Sekretariat BKIPM	80,00 %	97,50 %	Tercapai
7	Stasiun KIPM Bandung	80,00 %	97,50 %	Tercapai
8	Stasiun KIPM Cirebon	80,00 %	97,50 %	Tercapai
9	Balai KIPM Semarang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
10	Stasiun KIPM Yogyakarta	80,00 %	97,50 %	Tercapai
11	Balai KIPM Surabaya I	80,00 %	97,50 %	Tercapai
12	Balai KIPM Surabaya II	80,00 %	97,50 %	Tercapai
13	Stasiun KIPM Aceh	80,00 %	97,50 %	Tercapai
14	Balai KIPM Medan I	80,00 %	97,50 %	Tercapai
15	Stasiun KIPM Medan II	80,00 %	97,50 %	Tercapai
16	Stasiun KIPM Tj.Balai Asahan	80,00 %	97,50 %	Tercapai
17	Stasiun KIPM Padang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
18	Stasiun KIPM Pekanbaru	80,00 %	97,50 %	Tercapai
19	Stasiun KIPM Jambi	80,00 %	97,50 %	Tercapai
20	Stasiun KIPM Palembang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
21	Balai KIPM Lampung	80,00 %	97,50 %	Tercapai
22	Stasiun KIPM Pontianak	80,00 %	97,50 %	Tercapai
23	Balai KIPM Entikong	80,00 %	97,50 %	Tercapai
24	Stasiun KIPM Palangkaraya	80,00 %	97,50 %	Tercapai
25	Balai KIPM Banjarmasin	80,00 %	97,50 %	Tercapai
26	Balai KIPM Balikpapan	80,00 %	97,50 %	Tercapai
27	Balai KIPM Manado	80,00 %	97,50 %	Tercapai
28	Stasiun KIPM Tahuna	80,00 %	97,50 %	Tercapai
29	Stasiun KIPM Palu	80,00 %	97,50 %	Tercapai
30	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	80,00 %	97,50 %	Tercapai
31	Balai Besar KIPM Makasar	80,00 %	97,50 %	Tercapai
32	Stasiun KIPM Kendari	80,00 %	97,50 %	Tercapai
33	Stasiun KIPM Bau-bau	80,00 %	97,50 %	Tercapai
34	Balai KIPM Ambon	80,00 %	97,50 %	Tercapai
35	Balai KIPM Denpasar	80,00 %	97,50 %	Tercapai
36	Balai KIPM Mataram	80,00 %	97,50 %	Tercapai
37	Stasiun KIPM Bima	80,00 %	97,50 %	Tercapai
38	Stasiun KIPM Kupang	80,00 %	97,50 %	Tercapai

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
39	Balai KIPM Jayapura	80,00 %	97,50 %	Tercapai
40	Stasiun KIPM Merauke	80,00 %	97,50 %	Tercapai
41	Stasiun KIPM Bengkulu	80,00 %	97,50 %	Tercapai
42	Stasiun KIPM Ternate	80,00 %	97,50 %	Tercapai
43	Balai Besar KIPM Jakarta I	80,00 %	97,50 %	Tercapai
44	Stasiun KIPM Merak	80,00 %	97,50 %	Tercapai
45	Stasiun KIPM Pangkalpinang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
46	Stasiun KIPM Gorontalo	80,00 %	97,50 %	Tercapai
47	Stasiun KIPM Batam	80,00 %	97,50 %	Tercapai
48	Balai KIPM Tanjung Pinang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
49	Stasiun KIPM Sorong	80,00 %	97,50 %	Tercapai
50	Stasiun KIPM Mamuju	80,00 %	97,50 %	Tercapai
51	Balai KIPM Tarakan	80,00 %	97,50 %	Tercapai

Sekretaris Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan

Hari Maryadi